

ACEH

Illiza Paparkan 58 Aplikasi Layanan, Banda Aceh Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Oleh Redaksi • 14 Okt, 23.38 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal, memaparkan berbagai inovasi dan strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada kegiatan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Aceh di Kantor Komisi Informasi Aceh, Geuceu Komplek, Rabu, 14 Oktober 2026.

Dalam paparannya, Illiza menegaskan komitmen Pemerintah

Kota Banda Aceh untuk memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi publik secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan layanan digital, penguatan sistem pengaduan masyarakat, serta inovasi pelayanan yang menjangkau berbagai kebutuhan warga.

"Harapan kita ke depan, peningkatan ini semakin terintegrasi. Tidak hanya laporan masyarakat

ke pemerintah kota, tetapi juga antara gampong, kecamatan, dan pemerintah kota, sehingga pelayanan bisa berjalan lebih baik," ujar Illiza dalam wawancara se usai kegiatan.

Ia menjelaskan, keterbukaan informasi di Banda Aceh terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut terlihat dari pengembangan Com-

mand Center yang mengintegrasikan data dari berbagai perangkat dan aplikasi untuk membantu pemantauan kondisi kota, merespons kejadian, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

[Selengkapnya di halaman 21 »](#)

NASIONAL

Febrie Minta Bebas, Kejagung Cuek: Dakwaan Sudah Benar!



BANDA ACEH – Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap berdiri pada keyakinannya bahwa surat dakwaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, telah disusun dengan benar.

Sikap itu disampaikan di tengah perlawanan Febrie yang meminta hakim membatalkan dakwaan sekaligus memerintahkan dirinya keluar dari tahanan.

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

LINGKUNGAN

Tujuh Panglima Laot Simeulue Perkuat Kemitraan dengan DKP Aceh Jaga Kawasan Konservasi PISISI



BANDA ACEH — Tujuh Panglima Laot Lhok yang berada di Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, dan Pulau Simanaha (PISISI), Kabupaten Simeulue, memperkuat koordinasi dan kemitraan dengan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh untuk menjaga kelestarian ekosistem laut serta keberlanjutan sumber daya perikanan.

[Selengkapnya di halaman 26 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	21
INTERNASIONAL	23
EKONOMI	25
Aneka Berita	26

NASIONAL

Serang Prabowo, Politikus PSI: Presiden Omon-omon Hanya Hasilkan Masalah



BANDA ACEH - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti perbedaan antara pemimpin yang menghasilkan

dampak nyata bagi rakyat dan pemimpin yang dinilai lebih banyak berbicara daripada menyelesaikan persoalan.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

NASIONAL

Amien Rais Bilang Makin Lama Gibran Ngotot Bertahan, Makin Besar Kemarahan Publik



BANDA ACEH - Isu Wapres Gibran Rakabuming dan ijazahnya terus memanaskan dan diwarnai dengan desakan-desakan tajam dari berbagai tokoh sentral. Salah satu kritik paling keras datang dari tokoh reformasi sekaligus Pendiri Partai Ummat, Amien Rais.

Amien Rais mendesak politikus muda itu untuk segera menanggalkan jabatannya, menyusul polemik latar...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

LINGKUNGAN

Menyegel Konsesi, Menguji Nyali Hukum Lingkungan Kita

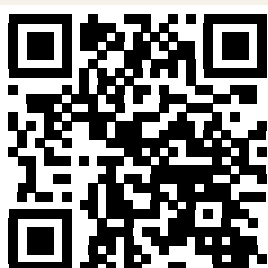


MEDAN - Puncak kemarau panjang kembali menyuguhkan pemandangan yang memilukan di langit Indonesia. Di tengah kepungan kabut asap yang mencekik ruang hidup, publik menyaksikan satu langkah progresif dari meja hijau birokrasi.

[Selengkapnya di halaman 27 »](#)

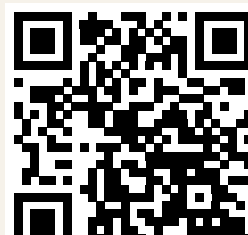
BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Serang Prabowo, Politikus PSI: Presiden Omon-omon Hanya Hasilkan Masalah

Oleh Redaksi · 14 Okt, 20.59 WIB



BANDA ACEH - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti perbedaan antara pemimpin yang menghasilkan dampak nyata bagi rakyat dan pemimpin yang dinilai lebih banyak berbicara daripada menyelesaikan persoalan.

"Inilah perbedaan presiden yang kerja dan yang omon-omon. Yang kerja menghasilkan efek jangka panjang bagi rakyat. Yang omon-omon hanya menghasilkan masalah berkepanjangan," kata Dedy dalam pernyataannya di akun X (Twitter), Rabu (14/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah perdebatan mengenai kinerja pemerintahan Prabowo, realisasi program prioritas, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Kritik Dedy mengarah pada ukuran keberhasilan seorang presiden. Menurut pandangan yang disampaikannya, keberhasilan pemimpin semestinya tidak berhenti pada pidato, janji Politik, atau pengumuman program, tetapi

harus terlihat dalam perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Istilah "omon-omon" sebelumnya juga digunakan Prabowo ketika menjelaskan capaian pemerintahannya.

Dalam acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor pada 19 September 2026, Prabowo menyatakan pemerintahannya telah menghasilkan berbagai keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya bukan pemimpin yang hanya berbicara tanpa bekerja. Ia juga menyebut berbagai capaian pemerintah telah dihimpun dalam sebuah buku.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian mengenai bagaimana kinerja pemerintah seharusnya diukur. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan capaian program yang telah dijalankan. Di sisi lain, kritik politik menuntut agar hasilnya diuji melalui dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Kinerja pemerintahan Prabowo dapat diuji melalui sejumlah indi-

kator ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Namun, pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan.

Angka tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap tumbuh, meskipun laju pertumbuhan pada triwulan II lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Data ini menjadi salah satu indikator untuk menilai perkembangan ekonomi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan seluruh kebijakan pemerintah.

Sumber: BPS, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 dan BPS, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026.

Pada sisi kesejahteraan, BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka itu turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 8,25 persen.

Penurunan kemiskinan tersebut merupakan perkembangan positif yang perlu diperhitungkan dalam evaluasi pemerintah. Meski demikian, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai puluhan juta orang menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan belum selesai.

Kritik Dedy juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai hubungan antara janji politik dan hasil pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, presiden tidak hanya dituntut menyampaikan arah pembangunan, tetapi juga memastikan program berjalan sesuai sasaran dan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.

Penilaian terhadap pemerintah perlu mencakup penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat, pengendalian harga kebutuhan pokok, pengurangan kemiskinan, kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan fiskal.

Dengan ukuran tersebut, pernyataan politik yang keras perlu diikuti pengujian melalui data.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Amien Rais Bilang Makin Lama Gibran Ngotot Bertahan, Makin Besar Kemarahan Publik

Oleh Redaksi · 14 Okt, 20.42 WIB



BANDA ACEH - Isu Wapres Gibran Rakabuming dan ijazahnya terus memanaskan dan diwarnai dengan desakan-desakan tajam dari berbagai tokoh sentral. Salah satu kritik paling keras datang dari tokoh reformasi sekaligus Pendiri Partai Ummat, Amien Rais.

Amien Rais mendesak politikus muda itu untuk segera menanggalkan jabatannya, menyusul polemik latar belakang pendidikan yang tak kunjung menemui titik terang. Ia memberikan peringatan yang sangat serius mengenai dampak sosiologis dari bertahannya sosok putra sulung dari Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keengganan Gibran untuk mundur menurutnya justru akan menjadi bumerang yang menghantam balik reputasi seluruh trah keluarganya. Semakin lama politikus itu bercokol sebagai orang nomor dua di negara ini, ia memprediksi bahwa kekecewaan masyarakat akan semakin besar terhadap dinasti Politik dari Jokowi.

Pangkal dari kekecewaan massal ini adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Meski secara amar putusan pengadilan menolak permohonan penggugat secara prosedural, ia menafsirkan bahwa pertimbangan majelis hakim secara tersirat menunjukkan ketidaklayakan Gibran. Hal itu terutama terkait ketiadaan bukti penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA) dari luar negeri.

MK tidak meredakan polemik mengenai pendidikan Gibran. Sebaliknya, kekecewaan masyarakat justru semakin meluas," kata Amien, dikutip pada Rabu (14/10/2026).

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini bahkan memproyeksikan sebuah skenario yang mengerikan bagi stabilitas negara. Jika krisis kepercayaan ini terus dibiarkan menganga, akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik tersebut sangat berpotensi bermetamorfosis men-

jadi gerakan jalanan massal atau people power.

Amien menyebut apabila skenario chaos tersebut benar-benar meletus, ia ragu apakah aparat keamanan di lapangan memiliki kapasitas yang cukup untuk membendung gelombang demonstrasi rakyat.

Selain menyoroti potensi instabilitas, ia juga menguliti kapasitas Gibran. Ia menilai sang wakil presiden gagal memberikan keteladanan yang mumpuni bagi generasi milenial dan Gen Z, terutama dalam hal pemahaman sejarah kebangsaan.

Amien juga secara tajam mengkritik program-program kampanye yang pernah digaungkan Gibran. Salah satu yang paling disorot adalah janji fantastis penciptaan 19 juta lapangan kerja baru. Bagi Amien, janji tersebut hanyalah pepesan kosong yang gagal dieksekusi, sekaligus menjadi bukti tambahan atas ketidakmampuan dari Gibran.

Ia menduga kuat bahwa ada perlakuan istimewa dalam proses pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Ia menuding lembaga pemilu sengaja meloloskan politikus itu secara tidak wajar semata-mata karena statusnya sebagai anak kandung dari Jokowi.

Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.

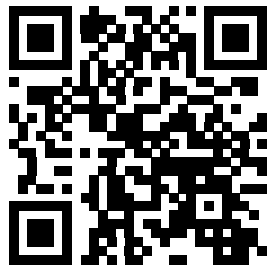
Ia mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Syahganda menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar dia.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

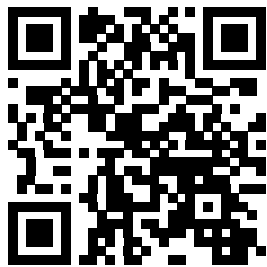
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Febrie Minta Bebas, Kejagung Cuek: Dakwaan Sudah Benar!

Oleh Redaksi · 14 Okt, 16.58 WIB



BANDA ACEH – Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap berdiri pada keyakinannya bahwa surat dakwaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, telah disusun dengan benar.

Sikap itu disampaikan di tengah perlawanan Febrie yang meminta hakim membatalkan dakwaan sekaligus memerintahkan dirinya keluar dari tahanan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan jaksa meyakini dakwaan terhadap Febrie telah memenuhi ketentuan.

"Jaksa berkeyakinan bahwa surat dakwaan sudah benar, itu saja," ujar Anang kepada wartawan di Gedung Utama Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026).

Meski demikian, Kejagung menyatakan eksepsi atau nota perlawanan merupakan hak terdakwa yang dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kejagung menyerahkan sepe-

nuhnya keputusan atas keberatan tersebut kepada majelis hakim.

"Ya eksepsi itu hak daripada terdakwa dan diatur dalam KUHP. Perkara nanti dikabulkan atau tidak, kewenangan ada di majelis hakim yang menentukan," imbuhnya.

Perlawanan Febrie terhadap dakwaan jaksa disampaikan secara langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu (14/10/2026).

Dalam nota perlawanannya, Febrie meminta majelis hakim menerima seluruh dalil keberatan yang diajukan dirinya bersama tim penasihat hukum. Ia menilai surat dakwaan penuntut umum disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat.

Atas dasar itu, Febrie meminta surat dakwaan dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tak hanya meminta dakwaan digugurkan, Febrie juga meminta berkas perkara dan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum.

Ia sekaligus memohon agar dirinya segera dikeluarkan dari taha-

nan setelah putusan atas nota perlawanan dibacakan.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya hukum Febrie untuk menggugurkan dakwaan sebelum pemeriksaan perkara berlanjut ke tahap berikutnya.

Namun, dikabulkan atau tidaknya keberatan itu sepenuhnya bergantung pada pertimbangan majelis hakim.

Di hadapan majelis hakim, Febrie juga menyinggung perjalanan kariernya selama sekitar 30 tahun di lingkungan Kejaksaan Agung.

Ia mengklaim tidak pernah meminta jabatan sejak awal berkarier sebagai jaksa hingga menduduki posisi terakhir sebagai Jampidsus. Febrie turut mengungkap berbagai perkara yang pernah ditanganinya selama bertugas.

"Saya tidak pernah meminta jabatan dari awal mula saya sebagai jaksa hingga jabatan terakhir saya Jampidsus," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Febrie di tengah proses hukum yang kini menempatkannya sebagai terdakwa.

Meski mengajukan keberatan terhadap dakwaan, klaim menge-

nai perjalanan kariernya tidak menghapus proses pembuktian yang harus dijalani dalam persidangan.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah didakwa melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai Rp55 miliar. Jaksa menyebut dugaan perbuatan tersebut dilakukan Febrie melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.

Selain dugaan pemerasan, Febrie bersama pihak lainnya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Nilai transaksi yang didakwakan dalam perkara TPPU tersebut mencapai Rp346.743.821.282 atau sekitar Rp346,7 miliar, ditambah USD440.990 yang disebut setara dengan sekitar Rp7,9 miliar.

Dengan demikian, perkara yang menjerat mantan Jampidsus itu tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha, tetapi juga mencakup dugaan pencucian uang dengan nilai ratusan miliar ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Analisis Militer Peringatkan Wapres Gibran Bisa 'Di-Nepal-kan'

Oleh Redaksi · 14 Okt, 21.38 WIB



BANDA ACEH - Analisis Politik dan militer Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, memperingatkan potensi gejolak sosial jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengundurkan diri di tengah polemik ijazah yang kembali mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Peringatan tersebut disampaikan Ginting dalam dialog bersama Indra J Piliang di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (14/10/2026). Ia menilai situasi politik pascaputusan MK berpotensi memicu instabilitas jika tidak ditangani secara tepat.

"Kalau Gibran itu tidak mundur sebagai wakil presiden, saya khawatir dia akan dinepalkan. Artinya keluarga Solo bisa dinepalkan. Ini merujuk pada gerakan massa di Nepal, tekanan luar biasa dari bawah, people power, yang memaksa sebuah dinasti politik waktu itu turun takhta," tegas Ginting.

Menurut dia, potensi gejolak tersebut juga berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ginting menyinggung data survei yang, menurutnya, menunjukkan 75 persen masyarakat mengalami stres berat akibat tekanan hidup. Ia juga menyoroti persoalan lapangan kerja yang membuat sebagian sarjana harus bekerja serabutan.

Ginting menilai tekanan ekonomi yang berpadu dengan persoalan legitimasi kepemimpinan dapat memperbesar risiko konflik sosial. Ia mengingatkan bahwa kebutuhan mekanisme konstitusional dan proses politik di DPR berpotensi memperburuk keadaan.

"Jika mekanisme konstitusi itu mampet, apalagi situasi di DPR mandek, tentu potensi amuk massa ini bisa terjadi. Gejolak sosial akan memaksa kejatuhan politik secara paksa, seperti yang baru-

baru ini kita lihat dalam situasi krisis di Prancis," paparnya.

Ginting juga berpandangan bahwa polemik mengenai legitimasi ijazah Gibran dapat menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, persoalan tersebut berisiko mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pemulihan stabilitas nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai jalan keluar, Ginting menyarankan agar Gibran mengundurkan diri secara sukarela. Ia menilai langkah tersebut dapat meredakan ketegangan politik sekaligus mencegah potensi gejolak sosial yang lebih luas.

"Lebih baik Gibran mundur secara gentle supaya situasi negara ini tetap stabil. Menyelamatkan marwah keluarga dan institusi itu bisa dilakukan bersamaan kalau dia mundur," jelas Ginting.

Ia menyarankan Gibran meneladani Soekarno, Mohammad Hatta, Soeharto, dan BJ Habibie yang, menurutnya, menunjukkan sikap kenegarawanan dengan memilih melepaskan jabatan daripada membiarkan konflik politik semakin membesar.

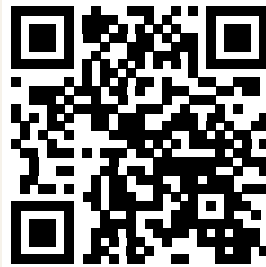
Ginting menutup analisisnya dengan memperingatkan risiko yang dapat dihadapi Gibran jika tetap bertahan. Ia menyinggung kemungkinan proses pemakzulan atau impeachment melalui DPR dengan dasar dugaan perbuatan tercela, serta potensi persoalan pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen pendidikan.

Pernyataan tersebut merupakan analisis dan peringatan yang disampaikan Ginting dalam dialog tersebut. Potensi people power, pemakzulan, maupun konsekuensi hukum yang ia sebutkan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa proses-proses tersebut telah terjadi atau dipastikan akan berlangsung.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

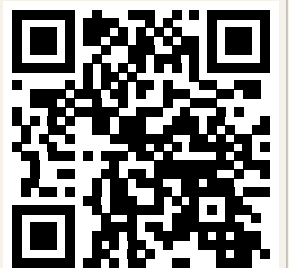
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Budi Arie soal Ijazah Gibran: Enggak Palsu, Hanya Berbeda

Oleh Redaksi · 14 Okt, 18.57 WIB



BANDA ACEH - Kabut misteri dan desas-desus liar terus menyelimuti dokumen akademik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Namun hal itu akhirnya dibongkar secara gamblang oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

Budi memberikan pengakuan kunci mengenai status keabsahan ijazah Gibran. Ia memastikan bahwa seluruh riwayat pendidikan anak mantan presiden itu itu adalah valid dan otentik. Narasi bahwa ijazah tersebut adalah produk rekayasa atau barang palsu dibantahnya mentah-mentah.

Inti dari persoalan yang sengaja dibesar-besarkan ini, menurutnya, hanyalah murni soal perbedaan nomenklatur dan metode akreditasi antarnegara.

"Cacat moral apa? Kesalahan apa yang dilakukan? Ini enggak ada yang palsu. Cuma berbeda," ujarnya dikutip pada Rabu (14/10/2026).

Budi Arie merasa sangat heran dan geram melihat bagaimana sebuah perbedaan format administratif bisa diseret begitu jauh hingga menjadi komoditas Politik untuk membunuh karakter seorang wakil kepala negara seperti Gibran.

Ia mempertanyakan logika pihak-pihak yang dengan mudah menyematkan label "cacat moral" kepada politikus muda itu hanya karena ia melalui jalur pendidikan yang tak lazim di mata publik Indonesia.

Menurutnya, perbedaan persepsi dan ketidakmampuan sebagian orang dalam memahami struktur sekolah internasional tidak boleh diubah menjadi alat untuk menghancurkan reputasi seseorang. Ia mengajak publik untuk berpikir objektif dan tidak membiarkan diri mereka dikonsumsi oleh propaganda politik yang kotor.

Bagi Budi Arie, segala tuduhan kejahatan atau pelanggaran berat harus dilandaskan pada bukti

hukum yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, bukan sekadar halusinasi yang didorong oleh motif dendam atau sakit hati kekalahan Pilpres.

Ia pun kembali mengajak masyarakat luas, khususnya para akademisi dan intelektual, untuk berani memilah mana kritik yang benar-benar membangun dan mana fitnah yang sengaja dikonstruksi atas dasar kebencian semata.

Perbedaan bentuk selembardokumen menurutnya sama sekali tidak mengubah fakta bahwa politikus itu secara sah telah menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan kepercayaan mayoritas rakyat dari Indonesia.

Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.

NASIONAL

Mahfud MD Anggap Indonesia Bangsa yang Sakit, Dana Bencana Dikorupsi BNPB

Oleh Redaksi · 14 Okt, 17.03 WIB



BANDA ACEH – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Prof Mahfud MD mengaku sangat sedih mendengar kabar yang tidak enak dari lingkungan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Pasalnya, terjadi OTT KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga yang saat ini seharusnya fokus berji-baku melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Sedih banget ini. Bangsa kita sepertinya betul-betul sakit. Bencana terjadi dimana-mana tetapi dana untuk penanganan bencana dikorupsi di lembaga pemerintahan yang mengurus bencana," tulis Mahfud MD dalam tweetnya di akun X pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (14/10/2026).

Ia tak habis pikir bagaimana mungkin ada orang-orang yang tega melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB.

"Bayangkan, OTT korupsi oleh KPK terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," tukasnya.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu yang diamankan yakni Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian.

Demikian diungkapkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di sela

kegiatan Jelajah Media, Yogyakarta, Selasa, 13 Oktober 2026 malam. Selain Sestama, tim Satgas KPK juga mengamankan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sejumlah pihak dari unsur swasta.

"Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," ucap Budi, seperti dikutip Holopis.com.

Dalam operasi senyap ini, KPK turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya uang tunai sekitar Rp 1,4 miliar, emas batangan, dan tabungan emas.

"Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar," ujar Budi.

Budi menyebut OTT yang dilakukan pihaknya ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. "Adapun kegiatan penyelidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB," ungkap Budi

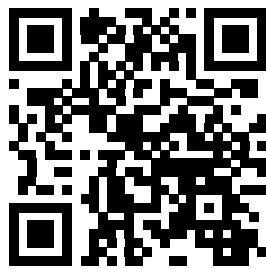
Para pihak yang diamankan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

"Untuk pengamanan para pihak ini dilakukan di Jabodetabek di beberapa lokasi. Untuk detil kronologi peristiwanya seperti apa, termasuk konstruksi perkaranya ini bagaimana, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut," tandas Budi

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

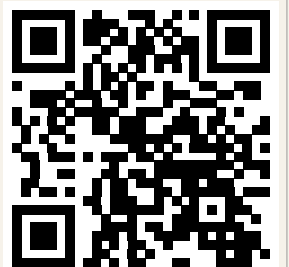
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Profil Martha Tilaar, Pengusaha Kosmetik Legendaris yang Meninggal Dunia di Usia 89 Tahun

Oleh Redaksi · 14 Okt, 10.45 WIB



BANDA ACEH - Martha Tilaar, pengusaha yang dikenal sebagai salah satu pelopor industri kosmetik lokal Indonesia, meninggal dunia pada Rabu (14/10/2026) pagi dalam usia 89 tahun. Namanya telah lama dikenal melalui kiprahnya membangun bisnis kecantikan yang mengangkat bahan alami serta kekayaan tradisi Nusantara.

Perjalanan Martha Tilaar di industri kecantikan tidak dimulai dari perusahaan besar. Dia merintis usaha melalui salon kecil di kawasan Menteng, Jakarta, sebelum mengembangkan bisnisnya menjadi Martha Tilaar Group.

Lantas, seperti apa profil dan perjalanan karier Martha Tilaar? Simak ulasan selengkapnya hanya di artikel ini.

Martha Tilaar lahir pada 4 September 1937. Berdasarkan pengumuman duka keluarga, dia meninggal dunia pada 14 Oktober 2026 dalam usia 89 tahun.

Perjalanan hidupnya dikenal melalui kiprah panjang dalam bidang kecantikan, pendidikan, dan pengembangan produk kosmetik berbasis kekayaan alam Indonesia.

Mengutip informasi pada situs resmi Martha Tilaar Group dan Sariayu, Martha memulai usaha kecantikannya pada 1970 dengan membuka Martha Salon di Jalan Tosari, Menteng, Jakarta.

Salon tersebut bermula dari garasi berukuran sekitar 4x6 meter di kediaman keluarganya. Dari usaha sederhana itu, Martha mulai membangun pondasi bisnis kecantikan yang kemudian berkembang selama puluhan tahun.

Selain menjalankan usaha salon, dia juga mengembangkan pendidikan kecantikan melalui Puspita Martha.

Mendirikan Sariayu pada 1977

Salah satu tonggak penting dalam perjalanan karier Martha adalah lahirnya Sariayu pada 1977.

Martha mengembangkan merek tersebut dengan menggali tradisi perawatan kecantikan perempuan Indonesia. Dia mempelajari manuskrip kuno dari Keraton Yogyakarta untuk memahami praktik perawatan kecantikan yang diwariskan secara turun-temurun.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upayanya memadukan

pengetahuan tradisional dengan pengembangan produk kosmetik modern.

Mengembangkan Perusahaan Kosmetik Nasional

Pada 1981, Martha bersama Pranata Bernard dan Theresa Harsini Setiady mendirikan PT Martina Berto. Perusahaan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan bisnis kosmetik dan produk herbal di bawah Martha Tilaar Group.

Perusahaan tersebut kemudian membangun fasilitas produksi modern di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Langkah ini menandai perkembangan bisnis Martha dari salon dan layanan kecantikan menuju industri manufaktur kosmetik.

Mengangkat Kekayaan Alam dan Budaya Indonesia

Dalam mengembangkan produk kecantikan, Martha dikenal menaruh perhatian pada bahan alami, tradisi lokal, dan kekayaan budaya Indonesia.

Pendekatan itu terlihat dalam pengembangan Sariayu, termasuk koleksi tren warna yang diperkenalkan pada 1987. Setiap koleksi mengangkat inspirasi berbeda dari

kekayaan alam maupun budaya Nusantara.

Melalui pendekatan tersebut, Martha berupaya memperkenalkan identitas kecantikan Indonesia melalui produk yang dikembangkan untuk pasar dalam negeri.

Menempuh Pendidikan Kecantikan di Amerika Serikat

Selain pengalaman bisnis, Martha juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang kecantikan.

Berdasarkan profil yang dipublikasikan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Martha menempuh pendidikan di IKIP Jakarta dan melanjutkan pendidikan kecantikan di Academy of Beauty Culture, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat.

Pengetahuan yang diperolehnya menjadi bekal dalam membangun usaha sekaligus mengembangkan pendidikan kecantikan di Indonesia.

Menerima Gelar Doktor Kehormatan

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Kisah Martha Tilaar Bangun Bisnis Kecantikan dari Garasi hingga Mendunia

Oleh Redaksi · 14 Okt, 10.49 WIB



BANDA ACEH - Pendiri merek kosmetik Sariayu Martha Tilaar, Martha Tilaar meninggal dunia pada Rabu (14/10/2026) pagi. Ia mengembuskan napas terakhirnya pada usia 89 tahun.

Menurut informasi yang diterima iNews, kabar duka disampaikan keluarga besar Tiara Kusuma, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia. Dalam pernyataan dukanya, Martha disebut merupakan Dewan Kehormatan Tiara Kusuma.

"Terima kasih atas segala inspirasi, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan bagi dunia kecantikan Indonesia," demikian pernyataan Tiara Kusuma.

Martha Tilaar dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan industri kosmetik Indonesia. Ia merintis bisnis kecantikan dari sebuah salon kecil di garasi rumah ayahnya hingga membangun usaha yang produknya dikenal di dalam dan luar negeri.

Martha Tilaar lahir di Kebumen, Jawa Tengah, pada 4 September 1937. Ketertarikannya pada dunia kecantikan semakin berkembang ketika dia mengikuti pendidikan di Academy of Beauty Culture, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat, saat mendampingi suaminya, H.A.R. Tilaar, yang mendapat kesempatan belajar di luar negeri.

Setelah lulus, Martha membuka salon kecantikan di Amerika Serikat (AS). Dia mempromosikan jasanya secara langsung, mulai dari membagikan brosur hingga mendatangi kampus dan rumah-rumah. Pengalaman tersebut menjadi bekal ketika dia kembali ke Indonesia dan memulai usaha sendiri.

Pada 1970, Martha membuka salon berukuran 6 x 4 meter di garasi rumah ayahnya. Dia membangun hubungan dekat dengan pelanggan melalui pelayanan personal. Dua tahun kemudian, dia membuka salon kedua di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, sekaligus memperkenalkan merek Sariayu Martha Tilaar.

Martha tidak berhenti pada layanan salon. Dia mulai mengem-

bangkan produk kecantikan dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Pada 1977, ia bekerja sama dengan Theresia Harsini Setiady dari PT Kalbe Farma untuk mendirikan PT Martina Berto. Perusahaan tersebut kemudian meluncurkan Sariayu Martha Tilaar sebagai produk pertamanya.

Bisnis Martha terus berkembang. Dia memperluas produksi melalui pembangunan pabrik kosmetik di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur, serta mendirikan perusahaan distribusi untuk memperkuat pemasaran produknya.

Salah satu kekuatan Martha adalah kemampuannya memadukan tren kecantikan dengan kekayaan budaya Nusantara. Pada 1987, Martha meluncurkan tren tata rias Senja di Sriwedari.

Setelah itu, Sariayu menghadirkan berbagai koleksi yang terinspirasi dari daerah dan budaya Indonesia, mulai dari Sumatera, Cirebon, Bali, Papua, hingga Toraja.

Pendekatan tersebut membantu Sariayu membangun identitas sebagai merek kosmetik yang mengangkat kecantikan Indonesia. Seiring perkembangan usaha, Martha Tilaar Group juga menaungi beragam produk kecantikan, perawatan tubuh, spa, dan jamu, termasuk Biokos, Caring Colours, PAC, serta Dewi Sri Spa.

Di balik perkembangan bisnisnya, Martha menempatkan riset dan inovasi sebagai bagian penting perusahaan. Dia mendorong pengembangan produk dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan impor. Upaya tersebut didukung investasi dalam penelitian dan pengembangan.

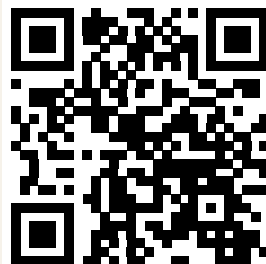
Perjalanan Martha tidak selalu berjalan mulus. Dia menghadapi tantangan dalam membesarkan merek lokal di tengah pandangan bahwa produk dalam negeri belum tentu memiliki kualitas yang setara dengan produk luar negeri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

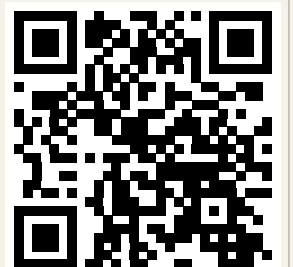
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Dosen NTU Sebut Lulusan MDIS Sulit Diterima Kerja di Singapura, di Indonesia Malah Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 14 Okt, 09.59 WIB



BANDA ACEH — Pernyataan seorang akademisi Indonesia yang mengajar di Nanyang Technological University (NTU) Singapura memicu diskusi hangat. Prof. Sulfikar Amir, Associate Professor di School of Social Sciences NTU, menyebut lulusan Management Development Institute of Singapore (MDIS) menghadapi kesulitan signifikan untuk mendapatkan pekerjaan di Singapura, terutama di sektor pemerintahan atau korporasi besar.

Pernyataan itu disampaikan Sulfikar Amir dalam diskusi program *Rakyat Bersuara* di iNews yang dipandu Aiman Witjaksono pada malam 13 Oktober 2026. Topik yang diangkat adalah “Bola Panas Putusan MK, Kemana Ujungnya”. Menurut Sulfikar, MDIS berstatus sebagai Private Education Institution (PEI) atau lembaga pendidikan swasta. Di Singapura yang sangat meritokratis, lulusan PEI secara sistemik lebih sulit menembus posisi bergengsi dibandingkan lulusan universitas negeri seperti National University of Singapore (NUS) atau NTU sendiri.

Pernyataan tersebut langsung ditimpali oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Ia berseoroh, “Di Indonesia malah jadi wakil presiden.” Sindiran itu jelas merujuk pada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, yang tercatat sebagai mahasiswa penuh waktu MDIS pada periode 2007–2010.

Latar Belakang Pendidikan Gibran di MDIS

MDIS sendiri telah mengeluarkan pernyataan resmi pada 1 Oktober 2025. Dalam keterangan tersebut, institusi menegaskan bahwa Gibran adalah mahasiswa penuh waktu dari 2007 hingga 2010. Ia menyelesaikan Advanced Diploma, kemudian memperoleh gelar Bachelor of Science (Honours) in Marketing yang diberikan oleh mitra universitas MDIS saat itu, University of Bradford, Inggris.

MDIS merupakan salah satu institusi pendidikan profesional non-profit tertua di Singapura (berdiri tahun 1956). Seperti kebanyakan PEI di negara itu, MDIS

tidak menerbitkan gelar sarjana atas nama sendiri, melainkan melalui kemitraan dengan universitas luar negeri. Gelar yang diperoleh Gibran berasal dari University of Bradford.

Polemik terkait latar pendidikan Gibran terus bergulir. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terkait pernah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan Gibran menyelesaikan pendidikan setara SMA berdasarkan hukum Indonesia. Gugatan perdata dan sorotan publik terhadap kualifikasi pendidikan Wapres masih menjadi isu hangat.

Prospek Kerja Lulusan MDIS: Fakta di Lapangan

Data resmi MDIS menunjukkan bahwa menurut Graduate Employability Survey (GES) SkillsFuture Singapore (SSG) 2024/25, sekitar 76,2% lulusan mereka berhasil mendapatkan penempatan permanen dalam enam bulan setelah lulus. Institusi juga memiliki Career Assistance Unit (CAU)

yang menyediakan portal Career-Hub, career fair, bimbingan, dan peluang magang.

Meski demikian, secara umum lulusan PEI di Singapura memang menghadapi persaingan lebih ketat dibanding lulusan universitas negeri. Beberapa survei menunjukkan tingkat pekerjaan full-time permanen lulusan institusi swasta lebih rendah daripada NUS, NTU, atau Singapore Management University (SMU). Alumni MDIS sendiri memberikan testimoni beragam: ada yang berhasil bekerja di perusahaan multinasional atau bahkan di luar negeri, ada pula yang mengakui tantangan di pasar kerja Singapura yang sangat kompetitif.

Pernyataan Sulfikar Amir dan respons Denny Indrayana kembali menyoroti perbedaan standar dan persepsi antara sistem pendidikan serta pasar kerja ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Kekuasaan Itu Manis dan Menggiurkan

Oleh Redaksi · 14 Okt, 08.18 WIB



Oleh: Ridha Rasyid

SEPENGGAL kalimat yang menarik dan menjadi perlu untuk diulas. Pada zaman Yunani kuno, kekuasaan itu sudah menjadi rebutan, karena pelbagai fasilitas yang disediakan. Meskipun pada era itu, kekuasaan tidak terpusat, namun terdesentralisasi pada wilayah yang begitu luas. Sehingga, kekuasaan terdistribusi dan memiliki otoritasnya sendiri. Inilah yang kemudian ditafsirkan munculnya raja-raja kecil jika menerapkan sistem desentralisasi atau kalau di negeri kita disebut otonomi daerah. Padahal, tidak seperti itu. Otonomi daerah atau desentralisasi menjadi suatu kebutuhan dalam mengembangkan wilayah.

Memberi ruang berkreasi kepada daerah untuk mengembangkan diri, menyelesaikan dan mengatasi persoalan yang terjadi di daerahnya dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pada saat yang sama, sumber daya manusia yang ada di daerah itu benar-benar dipergunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Makanya, pada zaman Yunani Kuno setiap wilayah itu dapat menunjukkan jati diri dan eksistensi daerahnya di mana segala sumber yang ada dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga rakyat menjadi peduli untuk ikut mengembangkan daerahnya.

Walaupun tulisan ini, tidak fokus pada perlunya otonomi daerah dilaksanakan secara konsisten dan transparan dalam kerangka menyerahkan sejumlah urusan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, namun itu salah satu problematika yang dihadapi mengapa negara itu tidak bisa maju. Ketika pemerintah pusat enggan menyerahkan kewenangan kepada daerah, itu menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta menjadi petunjuk betapa pemerintah pusat tidak mau kehi-

langan untuk mengurus sejumlah kewenangan.

Walaupun, jika pemerintah pusat ingin untuk lebih konsentrasi pada urusan yang lebih strategis itu jauh lebih baik, namun lagi-lagi ini menyangkut kue kekuasaan. Oleh karena dalam kekuasaan itu selalu diiringi dengan banyak fasilitas yang tersedia, sehingga tidak heran, memang, bila orang berebut dengan kekuasaan dengan menggunakan pelbagai cara.

Lalu, mengapa orang berlomba-lomba untuk menduduki kursi kekuasaan itu pada semua tingkat? Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong agar seseorang atau figur untuk maju dalam perebutan kekuasaan itu, antara lain, pertama, ada bakat dan animo kuat untuk mau berkuasa. Ketika seseorang merasa diri punya talenta, pengetahuan yang cukup dan punya visi, cenderung untuk ikut dalam kompetisi pemilihan lokal ataupun pemilihan nasional, kedua, namun itu tidak cukup. Diperlukan kemampuan untuk memengaruhi pemilih atau konstituen bahwa yang dia tawarkan memang diperlukan.

Sehingga seorang calon punya pandangan dan cita-cita masa depan yang unggul, ketiga, punya dana yang cukup untuk membiayai segala keperluan dalam menarik simpati masyarakat. Ongkos kampanye itu membutuhkan biaya besar karena banyaknya pihak yang dilibatkan. Sehingga, ada pameo ketika anda punya dana besar atau didukung finansial yang banyak, maka itu lebih mudah dalam melakoni kompetisi yang relatif dipenuhi pelbagai intrik.

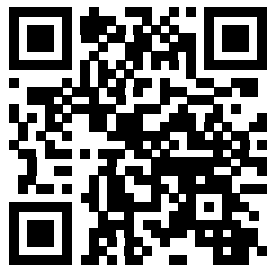
Itulah keniscayaan politik yang tidak hanya terjadi pada negara miskin, juga terjadi pada negara yang sudah mapan demokrasinya (kasuistik), keempat, alasan pokok mengapa orang ingin berkuasa, atau paling tidak ada dalam kekuasaan, karena ia bisa menggerakkan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

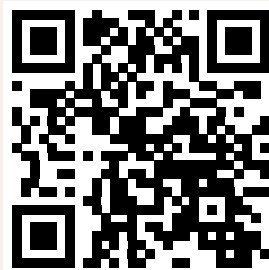
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

PKS Siap Bawa Polemik Ijazah Gibran ke DPR, Komisi II dan X Diminta Kaji Temuan MK

Oleh Redaksi · 14 Okt, 11.06 WIB



BANDA ACEH — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap membawa aspirasi masyarakat sipil terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR RI. PKS mendorong temuan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dikaji melalui mekanisme konstitusional dan fungsi pengawasan parlemen.

Komitmen itu disampaikan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf setelah menerima perwakilan masyarakat sipil dalam audiensi di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan pengamat, antara lain Ray Rangkuti, Effendi Ghazali, Ubaidillah Badrun, kalangan advokat, serta perwakilan organisasi mahasiswa.

Almuzzammil menegaskan, aspirasi publik agar temuan MK ditindaklanjuti melalui jalur hukum dan konstitusional merupa-

kan bagian dari kehidupan demokrasi.

"PKS memahami aspirasi berbagai elemen masyarakat yang ingin agar putusan MK ditindaklanjuti secara hukum dan konstitusional. Permintaan ini adalah hal yang wajar," ujar Almuzzammil, Rabu (14/10/2026).

Fraksi PKS Dorong Kajian di Komisi II dan Komisi X

Sebagai tindak lanjut, PKS akan membawa aspirasi tersebut melalui fraksinya di DPR RI. Almuzzammil menyebut Komisi II dan Komisi X sebagai komisi yang akan didorong untuk mengkaji persoalan tersebut sesuai ruang lingkup tugas masing-masing.

"DPR perlu mengkaji dan menindaklanjuti temuan MK sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Kami membawa aspirasi ini ke DPR RI melalui Fraksi PKS untuk dikaji di Komisi II dan Komisi X," tegasnya.

PKS juga berharap polemik ini menjadi bahan evaluasi bagi

penyelenggaraan pemilu berikutnya. Perbaikan sistem dan prosedur dinilai perlu dilakukan agar kontroversi serupa tidak kembali muncul dalam proses demokrasi mendatang.

Meski demikian, rencana pengkajian di DPR tersebut merupakan langkah Politik dan pengawasan parlemen, bukan keputusan untuk membatalkan hasil pemilu atau mengubah status Gibran sebagai wakil presiden.

Polemik yang dikenal sebagai Ijazah Gate kembali mengemuka setelah putusan MK terkait permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024 yang menyinggung persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangannya, MK menyoroti dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan dalam proses penyetaraan. Dokumen yang dibahas disebut menunjukkan keikutsertaan atau kehadiran dalam pendidikan, bukan bukti kelulusan yang secara langsung dapat dijadikan dasar penyetaraan

dengan jenjang SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan substansi lebih lanjut.

MK juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak lagi berada dalam ranah perselisihan hasil pemilu setelah Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Langkah PKS membawa persoalan ini ke DPR membuka ruang bagi aspirasi masyarakat sipil untuk dibahas melalui mekanisme kelembagaan. Fokus yang disampaikan PKS adalah mengkaji pertimbangan MK serta mengevaluasi sistem dan prosedur penyelenggaraan pemilu

NASIONAL

Pakar: Tak Semua yang Sekolah di LN Otaknya Pinter, Banyak yang Bertempat di Ruko-Ruko

Oleh Redaksi · 14 Okt, 16.50 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketiadaan bukti ijazah setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik reaksi keras dari berbagai pihak.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, secara blak-blakan menyoroti aspek integritas dan mendesak adanya pertanggungjawaban moral atas skandal tersebut.

Pernyataan tajam ini mencuat dalam sebuah video di kanal YouTube Hendri Satrio Official, di mana Agus menilai persoalan ini telah melampaui batas administrasi dan menyentuh langsung marwah kepemimpinan negara.

Gelombang kritik ini bermula dari pertimbangan hukum hakim MK pada sidang pembacaan putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 6 Oktober 2026.

Hendri membuka pertanyaan begini:

"Apakah sekolah di LN sudah pasti pintar?" tanya Hendri.

"Eggak pasti pintar, banyak sekolah di LN, tapi tempatnya di ruko-ruko, banyak di situ, banyak juga orang Indonesia sekolah di situ," jawab Agus.

Meski permohonan Denny Indrayana cs tidak dapat diterima karena alasan legal standing, MK secara eksplisit menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA.

Dokumen yang terlampir di pengadilan sebatas certificate of

attendance, academic records, dan explanation of grades. Ketiga dokumen tersebut hanya membuktikan kehadiran fisik di kelas, bukan merupakan bukti kelulusan yang sah.

Menanggapi fakta peradilan tersebut, Agus Pambagio yang lulusan master dari George Washington University itu menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden menuntut standar moral dan etika tertinggi. Ketika fakta hukum terkait syarat pencalonan justru terungkap cacat di lembaga peradilan tertinggi, kredibilitas pemimpin negara menjadi taruhannya.

Agus menekankan pentingnya rasa malu bagi seorang pejabat publik. Menurutnya, jika seorang pemimpin masih memiliki rasa malu setelah fakta ketidaklengkapan syarat ini terungkap ke publik, langkah paling terhormat yang harus diambil adalah mundur secara sukarela dari jabatannya.

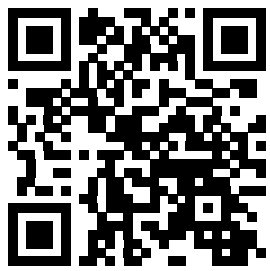
Walaupun MK tidak memiliki kewenangan langsung untuk mendiskualifikasi pejabat yang telah dilantik dalam putusan tersebut, Agus menilai desakan mundur ini adalah bentuk tanggung jawab moral yang tak bisa diabaikan.

Menghadapi polemik ini, Gibran Rakabuming Raka menyatakan tetap menghormati putusan MK. Ia menepis keraguan publik dengan logika bahwa dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura jika tidak lulus dari bangku SMA.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mantan Kepala BPIP sebut AS, India dan Perancis Tak Wajibkan Punya Ijazah SMA untuk Nyapres

Oleh Redaksi · 14 Okt, 16.37 WIB



BANDA ACEH - Di tengah guncangan polemik keaslian ijazah SMA Wakil Presiden di ruang publik, mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif, memberikan pandangan kritis.

Ia menyoroti perbedaan mendasar syarat pendidikan bagi calon pemimpin di berbagai belahan dunia dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Yudi menegaskan bahwa perdebatan ini tidak hanya menyentuh aspek formalitas hukum, tetapi juga memicu pertanyaan mendasar mengenai tolok ukur sejati dari kapasitas dan integritas seorang pemimpin bangsa.

Yudi membeberkan bahwa tidak semua negara demokrasi menjadikan pendidikan formal sebagai

prasyarat hukum untuk menduduki jabatan presiden.

Di Amerika Serikat, India, dan Prancis, konstitusi sama sekali tidak mencantumkan kewajiban memiliki ijazah SMA maupun gelar sarjana bagi calon kepala negara. Syarat utama di negara-negara tersebut berfokus pada batas usia, status kewarganegaraan, dan masa tinggal.

Fakta internasional ini memperlihatkan ketiadaan standar universal terkait tingkat pendidikan formal bagi seorang pemimpin.

Ketiadaan syarat tersebut bukan berarti mengabaikan arti penting pendidikan, melainkan menunjukkan bahwa dokumen akademis tidak dijadikan tolok ukur tunggal kelayakan hukum seseorang untuk maju dalam pemilihan.

Lebih lanjut, Yudi mengulas hubungan antara ijazah akademis dan kapasitas kepemimpinan. Menurutnya, ijazah memang menandai proses belajar, standar akademis, serta kemampuan berpikir kritis yang berguna dalam menangani persoalan ekonomi, hukum, hingga diplomasi negara.

Namun, dokumen formal tersebut dinilai bukan cermin utuh dari kualitas seorang manusia. Pendidikan tinggi tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan, kepekaan sosial, keberanian mengakui kesalahan, maupun integritas moral.

Sebaliknya, seseorang tanpa pendidikan tinggi bisa saja memiliki pengetahuan praktis dan kepekaan sosial yang tumbuh langsung dari pengalaman hidup.

Berbeda dari beberapa negara lain, Indonesia secara eksplisit

mengatur kualifikasi pendidikan bagi calon pemimpinnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon presiden dan wakil presiden wajib berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.

Ketentuan hukum ini menjadi isu krusial ketika kelengkapan dokumen pendidikan Wakil Presiden dipertanyakan oleh publik. Perdebatan ini pada akhirnya membuka dua dimensi penting: kewajiban memastikan pemenuhan ketaatan terhadap syarat hukum yang berlaku, sekaligus menguji sejauh mana ijazah formal seharusnya menjadi ukuran utama kelayakan seorang pemimpin.

NASIONAL

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Oleh Redaksi · 14 Okt, 10.57 WIB



BANDA ACEH -Sebanyak lima orang dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, Rabu, 14 Oktober 2026, sebanyak lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga di antaranya merupakan adik kandung Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bernama Bima S, tenaga ahli Kepala BNPB bernama Richard, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bernama Sigit.

Kelima orang tersebut rencananya akan segera dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan KPK) pada siang ini. Sementara untuk kegiatan konferensi pers direncanakan digelar pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Sebelumnya, Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, terdapat 14 orang yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Mereka terdiri dari Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pegawai atau tenaga ahli BNPB, hingga pihak swasta.

"Untuk pihak-pihaknya sementara Sestama, kemudian PPK, unsur lain di BNPB ada pegawai ataupun tenaga ahli, dan juga unsur swasta," kata Budi kepada wartawan di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa malam, 13 Oktober 2026.

Budi menjelaskan, para pihak yang diamankan diduga mengetahui konstruksi perkara sehingga dapat membantu KPK dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Ya artinya pihak-pihak yang diamankan diduga mengetahui bagaimana konstruksi perkara ini sehingga bisa membantu dalam proses pengungkapan," pungkasnya.

Dalam OTT yang dilakukan pada Selasa, 13 Oktober 2026, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia emas dalam bentuk emas batangan serta tabungan emas.

Budi mengatakan, dugaan korupsi yang tengah diusut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai (DSP) untuk kebencanaan.

"Ini masih kami akan dalam, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," jelasnya.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci proyek pengadaan yang diduga bermasalah, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana di Sumatera, maupun modifikasi cuaca.

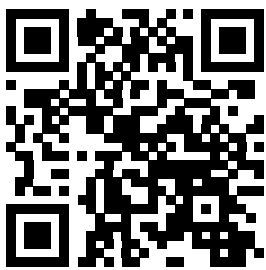
Menurut Budi, detail konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil ekspose di tingkat pimpinan KPK.

Saat ini, 14 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

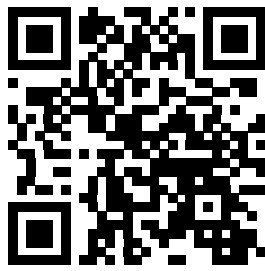
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Dosen UNJ: 60% Pengangguran Punya Ijazah, Sementara yang Tak Jelas Malah Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 14 Okt, 14.09 WIB



BANDA ACEH - Dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Secara blak-blakan, ia mengibaratkan kondisi negara sedang "sakit keras" layaknya penderita kanker stadium empat.

Salah satu pemicu utamanya adalah polemik seputar keaslian ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang hingga kini terus menggelinding menjadi bola liar di ruang publik.

Menurut Ubedilah, isu ijazah ini bukan sekadar masalah administratif biasa, melainkan telah bermutasi menjadi skandal politik terbesar dalam peradaban modern Indonesia.

Parahnya, skandal ini mencuat di saat negara sedang dihantam

berbagai krisis berskala besar. Ia mencontohkan darurat pembakaran hutan yang gagal ditangani maksimal.

"Mengutip riset CELIOS, 93 persen responden tidak percaya pemerintah bisa mengatasi pembakaran hutan. Kasus ijazah SMA Gibran ini masuk kategori skandal politik terbesar di tengah problem negara yang sangat besar," tegas Ubedilah dalam sinar RAKYAT BERSUARA.

Kritik Ubedilah makin menohok ketika membandingkan polemik ijazah Gibran dengan nasib Generasi Z (Gen Z) di Indonesia. Saat ini, angka pengangguran mayoritas disumbang oleh kelompok Gen Z dengan persentase mencapai 60 persen.

"Mereka (Gen Z) punya ijazah yang jelas, tapi di sisi lain

menganggur. Sementara ada orang yang ijazahnya diragukan, malah jadi wapres," sentilnya.

Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai menimbulkan interpretasi liar dan ketidakpastian di tengah masyarakat, Ubedilah menilai langkah politik melalui DPR adalah solusi yang paling logis. Ia menaksir sekitar 80 persen publik sudah setuju agar kasus ini didorong menuju Hak Angket DPR.

"Ruang untuk menguji kebenaran ijazah SMA itu ada di MK. Kalau dirasa belum cukup, sangat rasional jika dibawa ke DPR. Ini di atas hukum, ada persoalan etik yang sangat rusak dalam praktik politik kita," paparnya.

Lebih lanjut, Ubedilah menjelaskan bahwa Hak Angket DPR sebenarnya bisa menjadi panggung

pembuktian bagi Gibran. Jika dalam proses tersebut Gibran mampu membuktikan keaslian ijazahnya, maka logika keraguan publik akan otomatis terbalik.

Namun, jika dilihat dari kaca mata etika politik (virtue), polemik ini seharusnya sudah meruntuhkan legitimasi karena adanya dugaan kebohongan sejak awal proses berjalan.

Di akhir pernyataannya, Ubedilah memberikan tantangan terbuka untuk menyudahi kegaduhan nasional ini.

"Tolong Mas Gibran tunjukkan (ijazahnya), agar polemik ini berhenti. Pertanyaannya, kenapa tidak mau menunjukkan? Ada something!" pungkask Ubedil

NASIONAL

Ternyata Selain Sestama, OTT KPK Juga Amankan Terduga Kerabat Kepala BNPB?

Oleh Redaksi · 14 Okt, 11.11 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10). Dari sejumlah pihak yang diamankan, terdapat sosok yang memiliki hubungan dekat dengan Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

Menurut sumber, salah satu yang ditangkap memiliki hubungan dengan Kepala BNPB Suharyanto yaitu adiknya yang berinisial BM. BM diamankan dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta. Selain BM, menurut sumber terdapat juga orang kepercayaan Kepala BNPB yang berinisial RCH. RCH ini menurut sumber bekerja sebagai tenaga ahli kepala BNPB.

Selain keduanya, KPK turut mengamankan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan BNPB, serta sejumlah pihak swasta lainnya.

Akan tetapi baik jubar atau pihak KPK belum bisa membeber detail nama-nama yang kena OTT selain Rustian. "Untuk para pihak siapa-siapa yang diamankan, akan diinfo lebih lanjut," kata Ketua KPK Setyo Budiyo soal operasi senyap di BNPB pada Selasa (13/10) lalu.

Operasi senyap tersebut diduga berkaitan dengan transaksi ilegal dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penyidik tengah mendalami dugaan penyimpangan yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) untuk penanganan bencana.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa perkara yang menjadi dasar operasi tangkap

tangan tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di BNPB.

"Penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB," kata Budi Prasetyo di Jogjakarta, Selasa (13/10) malam.

Dana siap pakai merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut digunakan untuk mendukung penanganan bencana, mulai dari masa siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat menuju pemulihan.

Pada awal 2026, BNPB tercatat menerima alokasi dana siap pakai sebesar Rp 4,6 triliun. Namun, lembaga tersebut juga mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 5,6 triliun.

Besarnya anggaran penanganan bencana itu menjadi salah satu aspek yang relevan untuk dicermati dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut. Meski demikian, keterkaitan masing-masing pihak dengan dugaan penyimpangan masih perlu dibuktikan melalui proses hukum.

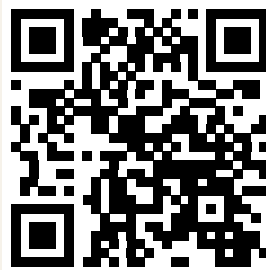
Dalam OTT tersebut, tim KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia berupa emas batangan. Berdasarkan penghitungan awal, nilai uang tunai yang diamankan mencapai sekitar Rp 1,4 miliar.

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dan logam mulia emas. Hitungan awal untuk uang tunai senilai sekitar Rp 1,4 miliar," pungkasknya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Parpol Pengusung Ogah Bela Gibran

Oleh Redaksi · 14 Okt, 13.38 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi ujian bagi ketahanan Politik putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

Sorotan kini tidak hanya tertuju pada persoalan ijazah, tetapi juga pada sejauh mana partai pengusung dan koalisi pemerintahan bersedia memberikan dukungan politik kepada Gibran.

Pengamat Politik Nurul Fatta mengatakan, putusan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. Namun, menurutnya, hal yang lebih menarik untuk dicermati adalah sikap elite politik dalam menghadapi polemik tersebut.

“Bagi sebagian orang, putusan MK menyisakan pertanyaan: ada atau tidakkah ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming? Bagi sebagian lainnya, yang lebih menarik adalah seberapa jauh elite politik, terutama partai pengusung dan partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, bersedia pasang badan untuknya,” katanya kepada RMOL, Rabu, 14 Oktober 2026.

Ia meyakini perdebatan mengenai ijazah Gibran tidak akan mudah berakhir, terutama jika dikaitkan dengan perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan luar negeri. Karena itu, ia menilai perdebatan tersebut terlalu normatif jika terus dijadikan fokus utama.

“Yang jauh lebih menarik adalah ke mana pertarungan narasi sedang diarahkan saat ini. Mulai

dari bagaimana peta koalisi menunjukkan sikapnya, dan siapa yang kini memegang supreme power, yakni kendali tertinggi yang menentukan arah dan nasib para pemain lain,” ujarnya.

Fatta menilai, fakta hukum dalam persidangan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran menjadi ujian tersendiri bagi ketahanan mental politik Wakil Presiden tersebut.

Menurutnya, situasi itu memperlihatkan apakah Gibran akan mendapatkan pembelaan dari partai-partai pengusung atau justru harus menghadapi polemik tersebut tanpa dukungan politik yang kuat.

“Jujur saja, fakta hukum persidangan dari putusan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran itu, saya

meyakini langsung menguji ketahanan mental politik putra sulung Presiden Jokowi itu. Apakah ia akan dibela atau dibiarkan berdiri sendirian,” tuturnya.

Dia menegaskan, partai-partai pengusung semestinya tampil memberikan pembelaan politik kepada Gibran. Namun, ia melihat respons yang muncul sejauh ini belum menunjukkan dukungan yang kuat.

“Dengan putusan tersebut, partai-partai pengusung semestinya tampil sebagai pembela. Faktanya tidak demikian. Mayoritas partai koalisi memberi pernyataan normatif, tidak terlalu agresif, sementara yang lain memilih berdiri memantau situasi dari tepi-tepi arena saja,” pungkasnya

NASIONAL

Begini Reaksi Habib Rizieq soal Gelombang Desakan Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 14 Okt, 21.41 WIB



BANDA ACEH - Gelombang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat. Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan pemakzulan Gibran pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketiadaan bukti ijazah setara SMA.

Habib Rizieq menegaskan bahwa seruan dari Forum Purnawirawan Jenderal TNI dan elemen masyarakat agar DPR RI segera menindaklanjuti Putusan MK terkait ijazah Gibran.

Menurutnya, masukan dari para purnawirawan merupakan pelajaran krusial yang wajib didengar oleh pemerintah dan lembaga negara.

“Ini suatu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan pernyataan purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajaran,” tegas Habib Rizieq.

Meningkatnya wacana pemakzulan ini dipicu oleh pertimbangan

hukum hakim MK dalam pembacaan putusan pada 6 Oktober 2026. Meskipun gugatan ditolak secara formal karena alasan kedudukan hukum (legal standing), MK secara eksplisit menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah setara SMA milik Gibran.

Bagi Habib Rizieq, temuan peradilan tertinggi tersebut merupakan alasan kuat untuk mempertanyakan kelayakan serta legitimasi Gibran dalam menduduki kursi Wakil Presiden.

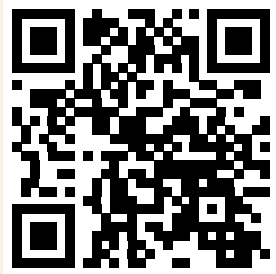
Selain mendukung pencopotan Gibran, Habib Rizieq juga melontarkan tuntutan tambahan yang tak kalah keras, yakni mendesak agar mantan Presiden Joko Widodo turut ditangkap dan diadili atas berbagai akar masalah yang terjadi saat ini.

Habib Rizieq mengingatkan bahwa dirinya telah secara konsisten menyuarakan kekhawatiran terkait dinamika kepemimpinan nasional sejak 2018. Ia menilai publik yang dulu belum menyadari persoalan tersebut kini mulai melihat kenyataan yang ada.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Bonatua Jadikan Putusan MK soal Gibran Bukti Baru Gugatan Keabsahan Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 14 Okt, 16.50 WIB



BANDA ACEH -Bonatua Silalahi selaku penggugat perkara perbuatan melawan hukum terkait dokumen legalisir ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali mengajukan bukti tambahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Bukti tambahan yang diajukan Bonatua bersama kuasa hukumnya, M Joni yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan untuk pencalonan Gibran Rakabuming pada Pemilu 2024 lalu.

Bonatua mengungkapkan, gugatannya ini memiliki kemiripan pola dengan sengketa ijazah Gibran Rakabuming di MK. Salah satu kemiripan tersebut adalah keengganan pihak terperiksa untuk menunjukkan dokumen asli kepada publik.

"Pertama, ijazahnya sama-sama tidak mau ditunjukkan ke publik. Kedua, yang bilang ijazah itu ada adalah kawan-kawannya, relawan-relawannya, kampusnya," kata Bonatua di PN Jakpus, Rabu (14/10/2026).

Bonatua juga membawa buku terbarunya berjudul "Ijazah Gibran juga Tidak Ada" ke persidangan sebagai tambahan bukti tertulis. Dia menilai, publik tidak membutuhkan penjelasan epistemologis (opini atau kesaksian orang lain), melainkan bukti ontologis, yakni wujud fisik dokumen aslinya.

"Nah, di sinilah kita berharap kembali ke sidang ini, adanya kesamaan pola-pola ini akan kita buktikan," ujarnya.

"Pola-pola ini nanti akan kita terangkan, semoga ya, kita sudah

masuk mendaftarkan bukti sudah berapa bukti kita, 22 ya? 22. Minggu depan kita akan sudah mulai masuk penggalian bukti termasuk dari pihak terkait," kata dia.

Diketahui, Bonatua Silalahi kembali mengajukan gugatan terkait keabsahan ijazah Joko Widodo (Jokowi). Bersama Laksma (Purn) Moeryono Aladin selaku penggugat, kali ini gugatan dilayangkan kepada sembilan pihak.

Gugatan ini teregister dengan Nomor Perkara: 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst yang klasifikasinya perbuatan melawan hukum (PMH).

Bonatua menjelaskan, dalam gugatannya ini dia mempermasalahkan legalisir ijazah Jokowi dari pencalonan wali kota Solo hingga

kontestasi presiden yang tidak mencantumkan tanggal.

Adapun, para tergugat terdiri yakni:

1. Ketua KPU RI
2. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua KPU Kota Surakarta
4. Ketua Bawaslu RI
5. Ketua Bawaslu DKI Jakarta
6. Ketua Bawaslu Kota Surakarta
7. Prof. Dr. Ir. Muhammad Na'iem, M.Agr.Sc.
8. Prof. Dr. Ir. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc., IPU
9. Rektor Universitas Gadjah Mada

NASIONAL

Bawaslu Solo Siap Hadapi Gugatan terkait Syarat Administrasi Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 14 Okt, 20.11 WIB



BANDA ACEH - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solo siap menghadapi gugatan terkait syarat administrasi ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) saat proses pencalonan wali kota hingga pemilihan presiden. Gugatan telah dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan teregistrasi dengan nomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Gugatan dilayangkan oleh Bonatua Silalahi bersama Moeryono Aladin. Gugatan dilayangkan kepada KPU, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, Bawaslu, Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu Solo, serta UGM (Rektor dan pihak terkait). Sidang yang rencananya digelar Rabu (14/10/26) di PN Jakarta Pusat, tertunda karena penggugat berencana menambahkan saksi dan ahli.

Dalam gugatannya, pihak penggugat menilai Bawaslu Kota Solo sebagai tergugat VI lalai dalam melakukan pengawasan syarat administrasi terkait ijazah Jokowi dalam pencalonan Wali Kota Solo pada saat itu.

Menurut penggugat, salinan legalisir ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan walikota,

gubernur hingga presiden tidak mencantumkan tanggal pengesahan sehingga dinilai cacat administratif dan melanggar ketentuan Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Solo, Setyo Puji Santoso mengatakan, pihaknya menghormati sepenuhnya langkah hukum yang dilakukan penggugat.

Namun demikian, Setyo memastikan, lembaganya telah memiliki argumentasi hukum tersendiri dalam menjawab gugatan tersebut.

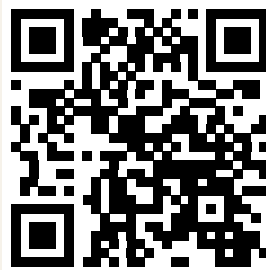
"Jika melihat pokok perkara yang ada dalam gugatan, ada beberapa catatan dari kami untuk disampaikan dalam persidangan nanti," ujar Setyo Puji Santoso dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Setyo mengaku optimistis eksepsi yang telah disiapkan Bawaslu Solo akan diterima oleh majelis hakim saat persidangan. Terlebih sudah ada putusan pengadilan sebelumnya yang secara substansi pokok perkara memiliki kesamaan. "Doakan saja semua berjalan lancar," tuturnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Persoalan Gibran Bukan Sekadar Politik tapi Penegakan Moral

Oleh Redaksi · 14 Okt, 13.35 WIB



BANDA ACEH -Aktivis senior Said Didu menyebut gerakan masyarakat sipil yang menggugat persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar persoalan Politik, melainkan upaya menyelamatkan bangsa dari kerusakan moral.

Hal itu disampaikan Said Didu saat menyambangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bersama kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi terkait persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024.

Menurut Said, langkah yang digagas pakar hukum tata negara Denny Indrayana menjadi momentum untuk menggugah kesadaran publik terhadap persoalan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sepertinya Allah menyayangi bangsa ini sehingga muncul Prof Indrayana untuk menggugah kita semua bahwa ada pelanggaran moral yang sangat tinggi di negeri ini selama 10 tahun terakhir,” kata Said, Rabu, 14 Oktober 2026.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh semata-mata dibaca sebagai pertarungan politik. Lebih dari itu, gerakan masyarakat sipil tersebut bertujuan mengembalikan moralitas sebagai landasan dalam memperoleh dan menjalankan kekuasaan.

“Ini bukan lagi politik, ini adalah moral. Kalau kita gagal menyelesaikan ini, maka bangsa ini akan berlanjut terus dengan kerusakan moral yang terjadi,” tegasnya.

Said mengatakan, masyarakat sipil mendorong partai politik

untuk bersama-sama memperjuangkan perbaikan moral dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, praktik menghalalkan segala cara demi merebut kekuasaan harus dihentikan agar kepemimpinan nasional kembali berpijak pada nilai-nilai moral.

“Kami masyarakat sipil mendorong betul partai politik berjuang bersama untuk membersihkan bangsa ini dari kerusakan moral yang dibikin untuk merebut kekuasaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Said mengaku berharap PKS tampil di depan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sipil. Ia menilai partai politik seharusnya menempatkan moralitas di atas kepentingan politik praktis.

“Saya senang datang ke PKS karena saya berharap PKS muncul

di depan sebagai partai yang mengutamakan moral daripada politik,” tuturnya.

Said kembali menekankan bahwa gerakan tersebut bukan semata-mata manuver politik untuk mempersoalkan Gibran. Ia menyebut gerakan itu sebagai upaya rakyat menyelamatkan bangsa dari kerusakan moral yang, menurutnya, dapat berlanjut lintas generasi apabila tidak diluruskan.

“Ini bukanlah gerakan politik semata, tapi gerakan rakyat menyelamatkan bangsanya dari kerusakan moral yang dibikin oleh bapaknya turun ke anaknya,” pungkas Said.

NASIONAL

KPK Sudah Tetapkan Tersangka Usai OTT BNPB, Siapa Saja?

Oleh Redaksi · 14 Okt, 16.45 WIB



BANDA ACEH -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan perkara tersebut diputuskan naik ke tahap penyidikan melalui forum ekspose di tingkat pimpinan pada Selasa malam.

“Setelah penyelidikan perkara ini diputuskan naik ke tahap penyidikan pada forum ekspose tadi malam, kemudian penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka,” kata Budi kepada wartawan, Rabu sore, 14 Oktober 2026.

Budi menjelaskan, para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya akan menjalani penahanan oleh penyidik KPK.

“Para tersangka tersebut selanjutnya tentu akan dilakukan penahanan,” pungkas Budi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh RMOL, sebanyak lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga orang di antaranya, yakni adik kandung Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bernama Bima S, tenaga ahli Kepala BNPB bernama Richard, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bernama Sigit.

Sebelumnya, KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Mereka terdiri dari unsur pejabat BNPB, termasuk Sestama dan PPK, pegawai atau tenaga ahli, serta pihak swasta.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia emas.

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai (DSP) untuk kebencanaan. Namun, detail konstruksi perkara dan identitas para tersangka belum disampaikan secara resmi.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

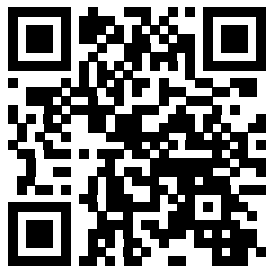
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Doli Kurnia Ungkap Dua Surat KPU, Curiga Ada Penyelundupan Pasal 18 Ayat 3

Oleh Redaksi · 14 Okt, 08.36 WIB



BANDA ACEH – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkap sejumlah hal yang menurutnya menimbulkan dugaan kuat tentang adanya penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam proses perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Doli menyoroti keberadaan dua surat permohonan konsultasi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masing-masing bertanggal 15 dan 19 September 2023.

Menurutnya, materi Pasal 18 ayat (3) tidak tercantum dalam dokumen awal yang diajukan untuk konsultasi, tetapi muncul dalam lampiran surat berikutnya.

Ia menjelaskan, surat pertama tertanggal 15 September 2023

berisi permohonan konsultasi terhadap perubahan PKPU. Dalam praktik yang biasa berlangsung, surat tersebut dilengkapi lampiran mengenai pasal atau ayat yang hendak diubah serta draf peraturan secara utuh.

Namun, setelah menelusuri dokumen tersebut, Doli mengaku tidak menemukan materi yang kemudian menjadi Pasal 18 ayat (3) dalam draf awal.

“Draft aslinya semua utuh, itu tidak ada sama sekali tentang pasal itu, 18 ayat 3. Saya cari-cari bahannya, enggak ada di situ,” kata Doli dalam podcast Obor Rakyat Reborn seperti dikutip Holopis.com, Rabu (14/10/2026).

Menurut Doli, KPU biasanya juga menyertakan bahan presentasi yang menjelaskan poin-poin perubahan peraturan, termasuk

substansi yang akan dibahas dalam konsultasi. Namun, ia mengaku tidak menemukan materi mengenai pasal yang dipersoalkan tersebut dalam dokumen presentasi.

Doli kemudian menelusuri dokumen lain dan menemukan surat KPU bertanggal 19 September 2023. Ia mempertanyakan alasan adanya surat permohonan konsultasi baru, padahal menurutnya jadwal konsultasi sudah ditetapkan pada 20 September 2023.

“Rupanya dia buat surat lagi tanggal 19. Tanggal 15 dia minta konsultasi, kami sudah tetapkan tanggal 20, ngapain lagi permohonan surat konsultasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti format lampiran surat kedua yang dinilai berbeda dari format yang lazim digunakan. Menurut Doli, berbagai materi perubahan dikumpulkan

dalam satu lampiran panjang, dan pada dokumen itulah ia menemukan materi yang kemudian menjadi Pasal 18 ayat (3).

“Nah, di situ disisip, Pasal 19 ayat 2 itu yang menjadi 18 ayat 3,” kata Doli.

Selain memeriksa dokumen, Doli mengatakan pihaknya telah menelusuri rekaman video rapat konsultasi. Berdasarkan penelusurannya, ia mengaku tidak menemukan pembahasan mengenai materi pasal tersebut dalam rapat maupun dalam bahan presentasi yang disampaikan.

“Nah, terus kita udah cek videonya semua, kan kita sudah punya video, tidak pernah dan dalam rapat konsultasi itu membicarakan itu, dan presentasinya juga enggak ada soal itu,” tuturnya

NASIONAL

Kasus Ijazah Gibran, Golkar Dorong Syarat Ijazah Masuk Dalam Revisi UU Pemilu

Oleh Redaksi · 14 Okt, 20.15 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong persyaratan serta mekanisme pencalonan pemimpin diatur lebih rinci dan transparan dalam revisi UU Pemilu.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dijadikan bahan penting dalam penyempurnaan sistem Pemilu ke depan.

“Dalam kaitan penyusunan UU Pemilu yang akan datang, putusan MK ini menjadi bahan yang akan kita jadikan materi penting dalam perubahan dan penyempurnaan sistem Pemilu kita ke depan,” ujar Doli, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Anggota Komisi II DPR RI itu menilai, kejelasan syarat perlu berjalan bersama mekanisme rekrutmen, seleksi, dan verifikasi yang semakin transparan agar

setiap proses pencalonan memiliki kepastian hukum.

Ia juga meminta penyelenggara Pemilu menjadikan putusan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kepatuhan terhadap konstitusi, aturan, integritas, dan tanggung jawab bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Ke depan syarat, proses rekrutmen, dan seleksi para pemimpin dan wakil-wakil rakyat, baik pusat maupun daerah harus diatur lebih rinci dan diatur mekanisme yang lebih transparan lagi,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu.

Saat ini, Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilu. Panja RUU Pemilu menargetkan penyelesaian Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pemilu selesai pada Desember 2026 dan DIM tersebut akan diserahkan kepada Badan Legislasi

NASIONAL

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Dimakzulkan, Prabowo Juga Harus

Oleh Redaksi · 14 Okt, 20.53 WIB



BANDA ACEH - Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilepaskan dari posisi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus ikut bertanggung jawab secara Politik karena keduanya terpilih sebagai satu paket dalam Pilpres 2024.

Suhandono berpandangan, kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak terlepas dari peran Gibran sebagai calon wakil presiden serta dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai dukungan politik Jokowi menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran meraih kemenangan.

“Jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus tumbang. Kedua-

nya satu paket,” demikian sikap Suhandono dalam menanggapi berkembangnya wacana pemakzulan Gibran, Rabu (14/10/2026).

Menurut Suhandono, kemenangan Prabowo tidak bisa hanya dilihat sebagai keberhasilan pribadi ataupun kekuatan Partai Gerindra. Ia menilai dukungan Jokowi dan keterlibatan Gibran dalam pasangan calon turut memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan tersebut.

Suhandono bahkan berpendapat bahwa tanpa dukungan Jokowi, peluang Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 akan berbeda.

Karena itu, ia menilai konsekuensi politik dari persoalan yang menimpa Gibran semestinya tidak hanya diarahkan kepada sang wakil presiden, tetapi juga menjadi perhatian terhadap posisi Prabowo sebagai presiden.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

SBY Sindir Mantan Presiden yang Tak Bisa Jadi Negarawan, Yang Dipikirkan Hanya Pemilu

Oleh Redaksi · 14 Okt, 14.07 WIB



BANDA ACEH - Ruang publik dan konstelasi Politik kembali dihentak oleh pernyataan tajam dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam sebuah mimbar akademik bergengsi, tokoh bangsa ini melontarkan kritik dan sindiran menohok mengenai krisis keteladanan di level pucuk pimpinan dari Indonesia.

SBY menyebut bahwa gelar mantan presiden sama sekali tidak menjamin seseorang otomatis bermetamorfosis menjadi seorang negarawan. Menurutnya, cara pandang terhadap masa depan bangsa adalah alat ukur utamanya.

Ia menyoroti fenomena elite politik, termasuk mereka yang pernah memegang tampuk kekua-

saan tertinggi, yang pikiran dan orientasinya masih saja terkungkung pada urusan bagi-bagi kekuasaan dan kemenangan di bilik suara.

SBY memaklumi jika seorang politisi aktif terus memikirkan pemilu. Namun, toleransi tersebut tidak berlaku bagi sosok yang seharusnya sudah mencapai level kearifan tertinggi.

"Politisi biasanya yang dipikirkan pemilihan umum berikutnya. Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, semoga terpilih kembali. Itu sah dan tidak salah. Anggota DPR RI, DPD, DPRD, terpilih kembali, tidak salah," katanya, dikutip Rabu (14/10/2026).

"Tapi negarawan harus memi-

kirkan masa yang jauh ke depan. Itulah negarawan," jelasnya.

SBY menyayangkan jika ada figur mantan presiden yang masih saja bermanuver layaknya politisi praktis dan terjebak dalam pusaran konflik elektoral. Ia menasihati para elite untuk menyadari posisinya.

"Negarawan itu tidak harus mantan presiden. Bukan semua (mantan presiden) bisa menjadi negarawan kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Country over party, country first (Negara di atas partai, negara yang utama)," tegur SBY.

Ia memperingatkan dengan keras agar para mantan pejabat tinggi tidak membalik logika pengabdian. Kepentingan kelom-

pok tidak boleh menyandera kepentingan republik.

"Jangan dibalik. Jangan partai politik diutamakan dan negaranya belakangan. Wrong (salah)," tegasnya.

Sebagai bentuk penegasan atas etika politik bernegara, ia menutup sindirannya dengan mengutip sebuah adagium politik universal yang seharusnya menjadi pegangan setiap pemimpin yang telah purnatugas.

"Ada kata-kata 'loyalty to my party ends when loyalty to my country begins' (loyalitas kepada partai saya akan berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai)," tutur SBY.

NASIONAL

Daripada Dimakzulkan, Mahfud Beri Opsi 'Jalan Ninja' Buat Gibran

Oleh Redaksi · 14 Okt, 12.39 WIB



BANDA ACEH - Isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih jauh dari kata usai. Di tengah gelombang tuntutan publik dan wacana pemakzulan (impeachment) yang terus disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil, sebuah saran menohok sekaligus tak terduga datang dari Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD.

Ia melontarkan sebuah opsi penyelesaian Politik yang dinilai-paling rasional dan elegan bagi Gibran. Daripada harus terseret dalam persidangan politik yang panjang, melelahkan dan menggerus martabat di parlemen, ia menyarankan agar politikus muda itu mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri secara sukarela dari kursi jabatannya.

Mahfud membedah secara mendalam implikasi hukum dan konstelasi politik pasca-keluarnya putusan terkait sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia memandang bahwa pengunduran diri bukanlah sebuah kekalahan, melainkan manifestasi dari kebesaran jiwa seorang negarawan. Ia bahkan meramalkan bahwa langkah mundur saat ini justru bisa menjadi investasi politik yang sangat menguntungkan bagi Gibran.

"Mas Gibran dengan segala kebesaran hati menyatakan, 'Sudahlah, saya mundur,' lalu persiapan diri lagi untuk running di

2029. Saya kira lebih terhormat," kata Mahfud, dikutip pada Selasa (13/10/2026).

Lebih lanjut, mantan hakim ini menilai bahwa opsi pengunduran diri secara sukarela memiliki potensi esar untuk meredam tensi politik nasional yang saat ini kian memanas. Keputusan elegan tersebut akan menyelamatkan bangsa dari kegaduhan konstitusional yang berlarut-larut, sekaligus menunjukkan kedewasaan berpolitik ke hadapan rakyat Indonesia.

Sikap kritis ini bukan tanpa dasar hukum. Ia menggarisbawahi substansi yuridis yang menjadi akar masalah, yakni ketiadaan dokumen fisik penyetaraan ijazah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Gibran di Pilpres 2024. Fakta administratif ini secara gamblang telah terungkap dalam pertimbangan majelis hakim MK beberapa waktu lalu.

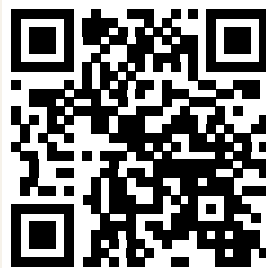
Bagi Mahfud, cacat administrasi yang terjadi di masa lalu merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan dan tidak bisa serta merta digugurkan atau ditambal oleh dokumen-dokumen susulan yang baru dimunculkan di kemudian hari.

"Pada saat mendaftar itu tidak ada, sudah terjadi ketika itu tidak ada. Kalaupun misalnya besok-besok tiba-tiba ada, tidak dipakai lagi untuk konteks (pemilu) ini, untuk berikutnya berarti," pungkas Mahfud.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

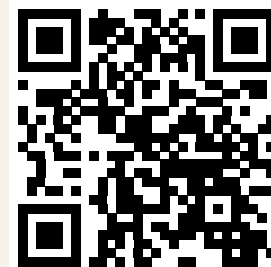
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Relawan Gibran Kasih Peringatan: Pemakzulan Wapres Akan Jadi Pintu Masuk Gulingkan Prabowo

Oleh Redaksi · 14 Okt, 09.54 WIB



BANDA ACEH - Eskalasi Politik kian memanas seiring dengan makin kencangnya embusan wacana pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Namun, di balik keriuhan polemik ijazah yang terus digoreng oleh sejumlah pihak, barisan pendukung sang wapres justru mengendus adanya skenario politik tingkat tinggi yang jauh lebih mengerikan mengarah ke Prabowo Subianto.

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan membunyikan alarm peringatan keras kepada seluruh elemen masyarakat. Menurut analisis politiknya, narasi pelengseran politikus yang didukungnya itu sejatinya hanyalah sebuah batu loncatan. Target

utama dari manuver sistematis ini diyakini mengarah langsung pada jatuhnya kekuasaan dari Prabowo.

Andi secara blak-blakan menyebutkan ada keterkaitan dalam rentetan gugatan dan opini publik yang menyudutkan Gibran. Ia mengistilahkan gerakan tersebut sebagai taktik licik yang memanfaatkan kebohongan publik untuk meruntuhkan legitimasi pemerintah yang sah.

"Mereka itu yang menyebarkan berita hoax dan politik karambol yang tujuannya menggulingkan pemerintahan arahnya dari Mas Gibran lalu Pak Prabowo," ungkap Andi, dikutip Selasa (13/10/2026).

Istilah "politik karambol" yang dilontarkannya merujuk pada strategi membenturkan satu isu untuk

menjatuhkan sasaran lain yang lebih besar. Menyadari adanya ancaman nyata yang mengintai stabilitas negara, ia menegaskan bahwa barisan relawannya kini telah merapatkan barisan dan dalam posisi siaga penuh untuk membentengi pemerintahan dari Prabowo-Gibran.

Adapun Andi memandang ancaman Hak Angket di parlemen maupun wacana pemakzulan secara konstitusional memiliki peluang yang sangat tipis untuk terwujud. Ia sangat percaya diri bahwa fundamental persoalan yang dituduhkan adalah pepesan kosong belaka.

"Kita yakin tidak hak angket dan sebagainya. Ini sudah jernih

dan terang benderang ijazah Mas Gibran," tuturnya.

Sebagai konteks, turbulensi politik ini bermula dari langkah berani Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana. Bersama 11 pemohon lainnya yang mencakup kalangan akademisi, ormas, dan partai politik, ia menggugat keabsahan syarat pencalonan Gibran.

Gugatan tersebut menyoroti Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia dinilai sarat akan cacat prosedural karena meniadakan syarat ijazah sekolah menengah atas luar negeri bagi kandidat yang bergelar sarjana.

NASIONAL

Dulu Dukung Jokowi, Kini Eks Waketum Projo Ikut Sarankan Gibran Mundur dari Wapres

Oleh Redaksi · 14 Okt, 10.38 WIB



BANDA ACEH - Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014-2019, Budianto Tarigan, menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Budianto, langkah tersebut merupakan pilihan paling kesatria untuk menjaga martabat keluarga di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024.

bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang menjadi syarat pencalonan wakil presiden.

Budianto juga mengingatkan Gibran agar tidak hanya mende-ngarkan orang-orang di lingkaran terdekat yang mendorongnya bertahan dalam menghadapi tekanan publik dan persoalan hukum. Ia menilai, mempertahankan jabatan di tengah polemik tersebut berpotensi memperbesar ketegangan sosial dan politik.

Saran itu disampaikan Budianto dalam perbincangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang tayang pada 13 Oktober 2026. Ia menegaskan, pandangannya merupakan nasihat pribadi sebagai orang yang pernah bersahabat dekat dengan keluarga Presiden Joko Widodo, bukan karena kepentingan Politik tertentu.

"Saya sarankan sebagai pernah berteman, dengan akal dan pikiran yang jernih, sebaiknya Gibran mengundurkan diri dari wakil presiden. Ini nasihat dari seorang teman yang tidak ada kepentingan aneh-aneh selain untuk menjaga martabat keluarga, termasuk anak cucunya," ujar Budianto.

Ia menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran telah menimbulkan persoalan legitimasi moral. Menurut Budianto, putusan MK menyoroti tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan

"Jangan terlalu mendengarkan orang-orang sekeliling, inner circle ini yang haus akan kekuasaan dan jabatan. Begitu nanti pergerakan di luar konstitusi terjadi, ini lari semua. Hitung matang-matang, lebih baik mundur. Itu lebih kesatria," tegas salah satu pendiri Projo tersebut.

Selain kepada Gibran, Budianto berharap Jokowi dan Iriana turut berperan dalam menentukan langkah yang diambil keluarga. Ia menyarankan Iriana meyakinkan Jokowi agar mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk mencegah dampak politik yang lebih besar.

Menurut Budianto, pengunduran diri secara sukarela akan lebih bermartabat dibandingkan jika Gibran harus menghadapi proses pemakzulan atau impeachment melalui parlemen.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

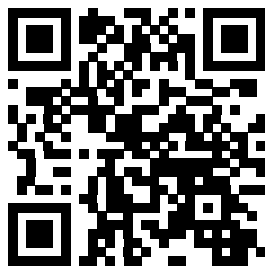
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Prof. Jimly Spill Celah Pemakzulan Gibran: Lewat Klaim ‘Perbuatan Tercela’ Fufufafa

Oleh Redaksi · 14 Okt, 10.03 WIB



BANDA ACEH - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama RI, Jimly Asshiddiqie, menyoroti desakan publik terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Desakan tersebut mencuat setelah putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Menurut Jimly, proses pemakzulan Gibran dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku apabila terdapat alasan yang dapat dibuktikan di MK.

Ia menyebut dua alasan utama yang berpotensi menjadi dasar proses tersebut. Pertama, dugaan perbuatan tercela yang dikaitkan dengan akun Kaskus Fufufafa

yang berisi hinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto, meskipun Gibran tidak mengakui akun tersebut sebagai miliknya. Kedua, adanya bukti baru terkait pemenuhan syarat administrasi pencalonan pada Pilpres 2024, termasuk yang berkaitan dengan polemik ijazah.

"Kalo mau, pmakzulan Gibran bisa diproses. Alasan bisa dibuktikan di MK: 1) Perbuatan tercela akun fufufafa tidak akui sebagai miliknya. 2) Ada bukti baru tentang pemenuhan syarat administrasi pilpres," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (15/10).

Lebih lanjut, Jimly menyatakan bahwa proses pemakzulan dapat dilakukan apabila mendapat dukungan Politik yang memenuhi syarat konstitusional.

"Mk impeachment bisa diproses tapi syaratnya inisiatif 2/3x2/3 DPR harus setuju. Prabowo mau tidak?" tandasnya.

Sebelumnya, MK mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil Pilpres 2024 yang menyoroti syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang dinilai meyakinkan berupa ijazah, diploma, maupun sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SMA atau sederajat.

Majelis juga menyinggung bahwa dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan hanya menunjukkan keikutsertaan atau kehadiran dalam pendidikan,

bukan bukti kelulusan. Meski demikian, MK tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa tersebut.

Selain itu, MK menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak lagi berada dalam ranah sengketa hasil pemilu mengingat Gibran telah resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memasuki pemeriksaan substansi lebih lanjut.

NASIONAL

Pemerintah Bakal Bagi-bagi HP Gratis, Ini Tujuannya

Oleh Redaksi · 14 Okt, 10.48 WIB



BANDA ACEH - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengumumkan rencana pemerintah untuk membagikan handphone (HP) gratis kepada masyarakat.

Adapun, pembagian HP gratis ini seiring dengan program rekening gratis dari pemerintah. Nantinya, kata Hashim, HP tersebut akan memuat rekening gratis yang otomatis memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu.

"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," ujarnya dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (14/10).

Saat ini, Hashim mengungkapkan ada dua bank Himbara yang ditunjuk pemerintah untuk menyediakan rekening gratis ini, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Keduanya memang diminta memfasilitasi pembukaan rekening bagi sekitar 30% penduduk Indonesia yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan.

"Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30% penduduk kita belum memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan," ujarnya.

Rekening tersebut dimaksudkan sebagai alat yang memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan tunai langsung. Hashim mengatakan bantuan langsung tunai tersebut akan dikirim secara langsung dari pemerintah pusat ke penerima.

"Terkait penyaluran bantuan tunai-mengingat Indonesia memiliki program bantuan tunai dan program sosial di mana pemerintah selama bertahun-tahun telah memberikan dana tunai kepada keluarga kurang mampu-seluruh bantuan tersebut tidak lagi akan disalurkan dalam bentuk uang tunai fisik. Sebaliknya, dana akan dikirimkan langsung oleh Pak Yuda (Wamenkeu) dan Kementerian Keuangan ke ponsel masing-masing penerima," ujar Hashim.

Pemerintah sendiri berencana membukakan rekening gratis untuk masyarakat berusia 17 tahun, sekaligus memberikan saldo awal Rp 50 ribu. Adapun, anggarannya saat itu disebut sebesar Rp 3,8 triliun dan menargetkan pelaksanaannya mulai awal tahun depan.

Tak hanya berhenti di pembukaan rekening koran, pemerintah menyiapkan program untuk aktivasi masyarakat yang diberikan rekening koran, agar tidak menjadi dana mengendap saja.

NASIONAL

Alasan Pemakzulan Gibran Sudah Terpenuhi

Oleh Redaksi · 14 Okt, 13.31 WIB

BANDA ACEH -Presidium Gerakan Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR), Marwan Batu-bara, menilai proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI seharusnya tidak perlu berlarut-larut.

Menurut Marwan, terdapat dua alasan yang nilainya dapat menjadi dasar pemakzulan Gibran, yakni perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Hal itu disampaikan Marwan saat menyampaikan aspirasi GMKR ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu, 14 Oktober 2026.

"Kalau bicara pemakzulan menurut Pasal 7A Undang-Undang Dasar, dari enam delik

untuk terjadinya pemakzulan itu sudah dua hal yang menjadi alasan pemakzulan itu bisa dieksekusi," kata Marwan.

Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/2026 yang menurutnya memperkuat alasan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pemakzulan.

Marwan mengatakan, GMKR sebelumnya telah mengirimkan surat aspirasi kepada delapan fraksi di DPR RI, termasuk Fraksi PKS. Namun, sejumlah fraksi menyampaikan belum dapat menerima mereka karena DPR sedang memasuki masa reses.

GMKR kemudian menyampaikan permohonan kepada pimpinan PKS hingga akhirnya mendapat

kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

"Kami dari GMKR mengapresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan PKS untuk menerima kami," ujarnya.

Marwan berharap DPR dapat segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme konstitusional. Ia menilai, apabila DPR menggunakan hak menyatakan pendapat, prosesnya tidak perlu diperpanjang dengan pembentukan panitia khusus atau mekanisme tambahan lainnya.

"Satu delik saja sudah cukup, apalagi dua," tegasnya.

Meski demikian, Marwan mengakui proses Politik di DPR tidak sederhana. Ia menyinggung pengaruh mantan Presiden Joko

Widodo yang menurutnya masih kuat serta berbagai pertimbangan politik yang dimiliki masing-masing partai.

Atas dasar itu, ia memahami apabila PKS belum ingin langsung tampil sebagai partai penginisiasi proses pemakzulan Gibran.

"Kami memahami sikap PKS untuk tidak langsung tampil seolah-olah menjadi partai inisiator," katanya.

Kendati demikian, Marwan berharap PKS dapat terus membangun komunikasi dengan partai-partai lain agar aspirasi pemakzulan Gibran mendapat dukungan politik dan dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku di DPR RI.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

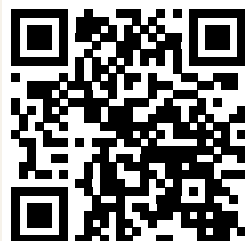
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Saat Kabut Asap Disebut Normal, Pejabat BNPB Justru Kena OTT

Oleh Redaksi · 14 Okt, 09.35 WIB



BANDA ACEH - Jurnalis sekaligus pegiat media sosial Ahmad Arif menyoroti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama berbulan-bulan di Kalimantan dan Sumatera.

Ia mengungkit pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pernah menyebut bahwa meski kabut asap pekat menyelimuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026.

"Berkulan-bulan rakyat Kalimantan dan Sumatera menghirup

kabut asap, sementara Kepala BNPB menyebut situasi normal," tulis Arif di akun X pribadinya, dikutip Rabu (15/10).

Namun, pada Selasa (13/10/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BNPB dan mengamankan 14 orang. Salah satu yang diamankan adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.

"Kini, sejumlah pejabat BNPB ditangkap KPK, termasuk Sestama," ungkap Arif.

Menurut Arif, ketika masyarakat kesulitan menghirup udara bersih akibat kabut asap, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya dinormalisasi.

"Ketika rakyat kesulitan untuk menghirup udara bersih, kita berhak bertanya: apakah yang dinormalisasi hanya bencana, atau juga masalah tata kelola dan korupsi di baliknya?" tegasnya.

Sebagai informasi, selain Sestama BNPB Rustian, tim satgas KPK juga mengamankan sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BNPB serta beberapa pihak dari unsur swasta.

OTT tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang sebagian menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana. KPK juga tengah mendalami kemungkinan keterkaitan kasus tersebut dengan pena-

nganan karhutla yang marak terjadi belakangan ini.

Hingga Rabu (14/10/2026), belasan orang yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pimpinan KPK menjadwalkan gelar perkara (ekspose) untuk menentukan status hukum para pihak yang diperiksa dalam waktu 1x24 jam setelah penangkapan.

Dalam operasi yang dilakukan di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya itu, KPK turut menyita barang bukti awal berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar, logam mulia dalam bentuk emas batangan, serta tabungan emas.

NASIONAL

Lima Tersangka OTT BNPB Ditahan KPK dan Pakai Rompi Oranye, Tangan Tertangkep

Oleh Redaksi · 14 Okt, 18.46 WIB



BANDA ACEH - Sebanyak lima tersangka dalam kasus korupsi yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Rabu (14/10) sore.

Lima tersangka itu sebelumnya diamankan bersama 14 orang lainnya termasuk Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, pada Selasa (13/10).

Rustian diamankan tim penindakan KPK bersama 13 orang lainnya dalam operasi senyap di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Pantauan JawaPos.com di lokasi, para tersangka mengenakan rompi oranye dikawal penyidik KPK turun dari ruang penyelidikan dan meninggalkan gedung KPK sekitar pukul 16.49 WIB.

Lima tersangka itu tak mengucapkan satu kata patah pun saat dicecar wartawan. Beberapa tersangka tampak menunduk dan menangkupkan tangannya sebagai tanda penyesalan.

Sementara itu, KPK belum membeberkan kasus korupsi yang

tengah ditangani maupun nama-nama dari para tersangka yang baru saja diangkut mobil tahanan tersebut.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, pada Selasa (13/10).

Rustian diamankan tim penindakan KPK bersama 13 orang lainnya dalam operasi senyap di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Meski demikian, belakangan Rustian dipulangkan karena statusnya masih sebagai saksi, bukan tersangka.

"Telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang," kata Budi Prasetyo di sela-sela Jelajah Media 2026 di Jogjakarta, Selasa (13/10) malam.

NASIONAL

SBY Singgung Prabowo saat Orasi di Unpad: Hati-hati Kalau Batuknya Keras

Oleh Redaksi · 14 Okt, 18.55 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan orasi ilmiah dalam acara dies natalis FISIP Unpad ke-68. Dalam kesempatan itu, SBY sempat berkelakar soal batuk.

SBY awalnya menyampaikan bahwa dirinya sedang batuk. Namun ia meyakinkan bahwa batuknya bukan karena influenza tipe A.

"Sebelum saya sampaikan orasi ilmiah, harus saya pastikan bukan orasi Politik, saya ingin sampaikan permohonan maaf, excuse coming from me, saya ini agak batuk, tapi bukan influenza A, aman, sehingga dalam sampaikan orasi ini sekali-sekali batuk, mohon dimaklumi," kata SBY mengawali orasi ilmiahnya dikutip dari YouTube FISIP Unpad, Rabu (14/10/2026).

SBY mengatakan batuknya terkadang mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ia juga mengakui itu mengganggu aktivitas melukisnya.

"Kalau saya batuk yang suka terganggu kiri-kanan saya, kalau saya melukis terus tiba-tiba batuk batuk pasti lukisannya rusak itu, tapi aman karena saya seorang seniman sekarang," ucap dia.

SBY lalu berkelakar soal batuk sambil menyinggung Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan saham dan rupiah bisa turun jika batuk Prabowo terlalu keras.

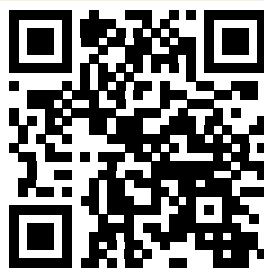
"Kalau yang batuk Pak Prabowo, hati-hati. Kalau batuknya keras, nilai tukar rupiah dan saham bisa jatuh," ujar dia.

Terlepas dari itu, SBY tetap mendoakan Prabowo. "Kita doakan presiden kita sehat sehingga bisa memimpin negara dengan baik," imbuh dia.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Pilpres 2029 Bisa Jadi Akhir Drama Politik Keluarga Solo

Oleh Redaksi · 14 Okt, 10.53 WIB



BANDA ACEH -Arah dukungan Politik mantan Presiden Joko Widodo terhadap wacana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode mengalami perubahan.

Jika sebelumnya Jokowi kerap mengarahkan relawan untuk mendukung pasangan tersebut kembali pada Pilpres 2029, belakangan ia memilih menjawab bahwa pemilu masih lama.

Pandangan itu disampaikan Pengamat Politik Nurul Fatta yang menyoroti perubahan sikap Jokowi di tengah menguatnya dukungan sejumlah partai politik terhadap Prabowo untuk kembali menjabat presiden dua periode.

Menurutnya, jawaban Jokowi bahwa Pemilu 2029 masih lama memang tidak keliru. Namun, respons tersebut dinilai tidak lagi setegas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang secara terbuka

mengarahkan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.

"Dulu Jokowi kerap mengarahkan relawan mendukung Prabowo-Gibran dua periode. Belakangan, jawabannya berubah, kata Jokowi, 'Pemilu 2029 masih lama'. Jawaban itu tidak salah, tetapi tak setegas dahulu, seperti layar yang mulai diputar mengikuti arah angin," kata Fatta kepada RMOL, Rabu, 14 Oktober 2026.

Perubahan sikap itu, menjadi bagian dari dinamika politik yang patut dicermati menjelang Pilpres 2029. Terlebih setelah sejumlah partai besar di parlemen, mulai dari Golkar, PAN, Gerindra, hingga PKB, menyatakan dukungan agar Prabowo kembali menjabat presiden untuk periode kedua.

"Perlu dicatat, dukungan ini tertuju pada Prabowo, belum tentu pada paket Prabowo-Gibran. Bila

komitmen itu terwujud dan bertahan hingga 2029, maka yang menentukan siapa pendamping Prabowo kelak adalah Prabowo sendiri, bukan lagi keluarga Solo," ungkap Fatta.

Nurul Fatta memandang dinamika tersebut dapat menandai berakhirnya persaingan pengaruh politik keluarga Solo dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

"Pada titik itulah selesai sudah drama persilatan politik keluarga Solo," tandasnya.

Dengan demikian, Pilpres 2029 tidak hanya akan menjadi pertarungan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga momentum bagi Prabowo dan partai-partai pendukungnya untuk menentukan kembali konfigurasi pasangan calon yang akan diusung.

NASIONAL

Geger Isu Nusron Wahid Sembunyi di Markas Intelijen, Kepala BIN Herindra Membantah

Oleh Redaksi · 14 Okt, 11.58 WIB



BANDA ACEH - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra membantah kabar yang menyebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berada di kantor BIN di tengah pengusutan dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Herindra menegaskan informasi tersebut tidak berdasar.

Di sisi lain, KPK mengaku belum mengetahui keberadaan Nusron. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih berharap politikus Partai Golkar itu bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami belum mendapat informasi soal keberadaan yang bersangkutan. Namun kami meyakini kepada NW (Nusron Wahid) ataupun pihak-pihak lain tentunya

akan kooperatif dalam proses penegakan hukum perkara ini," ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2026).

KPK menilai keterangan Nusron penting untuk membantu penyidik menyusun gambaran utuh perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Karena itu, penyidik telah mengirimkan surat panggilan dan menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Nusron pada pekan ini.

Sebelumnya, Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu (7/10/2026) dengan alasan memiliki agenda dinas. KPK kini kembali mengagendakan pemeriksaan untuk mendalami perkara tersebut.

Kasus yang tengah diselidiki berkaitan dengan dugaan suap

dalam pengurusan izin pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang melibatkan pengembang PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

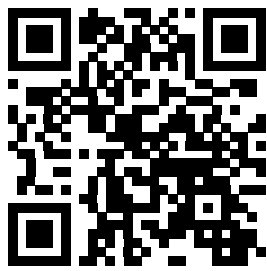
Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari kalangan pejabat kementerian dan pihak swasta, termasuk empat orang kepercayaan Nusron yang diduga berperan sebagai pengepul aliran dana suap.

Bantahan Kepala BIN mengenai keberadaan Nusron muncul ketika KPK masih berupaya memperoleh keterangannya untuk mengusut perkara tersebut. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan, keberadaan Nusron belum diketahui oleh penyidik.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mahfud MD Minta Gibran Mundur Sukarela, Sebut Lebih Terhormat ketimbang Dimakzulkan

Oleh Redaksi · 14 Okt, 08.27 WIB



BANDA ACEH - Mahfud MD menyarankan Gibran Rakabuming Raka mundur secara sukarela dari jabatan wakil presiden. Mantan Menko Polhukam itu menilai pengunduran diri akan lebih terhormat ketimbang Gibran harus menghadapi proses pemakzulan yang panjang dan sulit ditembus secara Politik.

Saran itu disampaikan Mahfud dalam siniar Terus Terang bersama Rizal Mustary saat membahas polemik persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Menurut Mahfud, Gibran bisa mengakhiri polemik dengan mengundurkan diri, kemudian mempersiapkan diri untuk kembali mengikuti kontestasi politik pada 2029.

"Mas Gibran dengan segala kebesaran hati menyatakan, 'Sudahlah, saya mundur,' lalu persiapan diri lagi untuk running di tahun 2029, saya kira lebih terhormat," ujar Mahfud, dikutip Selasa (13/10/2026).

Mahfud menilai jalan pemakzulan tidak mudah ditempuh. Selain harus memenuhi persyaratan konstitusional, proses tersebut juga berhadapan dengan peta kekuatan partai di DPR yang saat ini didominasi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam mekanisme pemakzulan, usulan pendapat DPR harus diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota. Sidang paripurna juga wajib memenuhi ketentuan kuorum dan persetujuan yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan koalisi pemerintah menguasai sekitar 80% kursi parlemen, Mahfud menilai jalan menuju pemakzulan akan menghadapi hambatan politik yang berat.

Di sisi lain, Mahfud kembali menyoroti persoalan dokumen penyetaraan ijazah setingkat SMA

yang menjadi bagian dari polemik pencalonan Gibran. Ia menegaskan, persyaratan administrasi harus dilihat berdasarkan kondisi saat pendaftaran dilakukan. Dokumen yang baru muncul belakangan, menurutnya, tidak serta-merta bisa digunakan untuk mengubah keadaan pada proses pencalonan sebelumnya.

"Pada saat mendaftar itu tidak ada, sudah terjadi ketika itu tidak ada. Kalau pun misalnya besok-besok tiba-tiba ada, tidak dipakai lagi untuk konteks (pemilu) ini, untuk berikutnya berarti," kata dia.

Meski melontarkan saran pengunduran diri, polemik persyaratan pencalonan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Penyelesaian persoalan tetap harus memperhatikan mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku

NASIONAL

Kepala BIN Bantah Nusron Wahid Berada di Markasnya

Oleh Redaksi · 14 Okt, 11.02 WIB



BANDA ACEH — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhamad Herindra membantah kabar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berada di markas BIN di tengah pengusutan dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Herindra menegaskan informasi tersebut tidak berdasar. Bantahan itu muncul saat KPK masih berupaya meminta keterangan Nusron dalam penyidikan dugaan suap terkait pengurusan sertifikat tanah.

Di sisi lain, KPK mengaku belum mengetahui keberadaan Nusron. Penyidik berharap politikus Partai Golkar tersebut kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan yang telah dijadwalkan ulang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya belum menerima informasi mengenai keberadaan Nusron.

"Kami belum mendapat informasi soal keberadaan yang bersangkutan. Namun kami meyakini kepada NW (Nusron Wahid) ataupun pihak-pihak lain tentunya akan kooperatif dalam proses penegakan hukum perkara ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2026).

KPK membutuhkan keterangan Nusron untuk membantu penyidik mengungkap secara menyeluruh dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penyidik telah mengirimkan surat panggilan dan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron pada pekan ini. Sebelumnya, Nusron tidak memenuhi

panggilan pada 7 Oktober 2026 dengan alasan memiliki agenda dinas.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mendalami perkara yang berkaitan dengan pengurusan izin pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk pengembang PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian dan pihak swasta.

Empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron diduga berperan sebagai pengepul aliran dana suap. Dugaan tersebut menjadi salah satu bagian yang perlu didalami penyidik dalam mengungkap konstruksi perkara

NASIONAL

Titi Anggraini: MK Bisa Diskualifikasi Gibran jika Syarat Ijazah Tak Terpenuhi

Oleh Redaksi · 14 Okt, 08.31 WIB



BANDA ACEH - Pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) secara hukum memiliki kewenangan mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka jika terbukti tidak memenuhi persyaratan administrasi pencalonan wakil presiden, termasuk terkait keabsahan ijazah.

Hal itu disampaikan Titi saat berbincang di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Dalam diskusi tersebut, ia menyoroti pentingnya pemenuhan syarat administrasi sebagai bagian mendasar dari keabsahan proses pencalonan dalam pemilu.

Menurut Titi, verifikasi ijazah dan dokumen pendidikan bukan sekadar formalitas. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari kepastian hukum yang harus dipenuhi setiap calon.

"Persyaratan formil adalah dasar kepastian hukum. Jika ada cacat atau ketidaksesuaian administrasi pada tahap awal yang diabaikan, hal itu berpotensi mencederai prinsip keadilan dan integritas pemilu," kata Titi.

Selain menyoroti kewenangan MK, Titi juga meminta DPR mengambil langkah konstitusional untuk mengklarifikasi polemik tersebut. DPR, kata dia, perlu

menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat dibuka secara transparan.

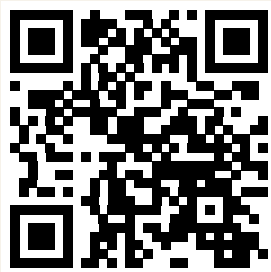
Jika ditemukan pelanggaran syarat konstitusional yang mendasar, DPR juga diminta memproses mekanisme pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.

Titi menilai penanganan persoalan tersebut penting untuk menjaga supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Setiap proses penyelenggaraan negara, menurutnya, harus berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Terjaring OTT KPK, Sestama BNPB Rustian Punya Harta Rp 3,5 Miliar, Didominasi Tanah dan Bangunan

Oleh Redaksi · 14 Okt, 08.42 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, pada Selasa (13/10). Rustian diamankan tim penindakan KPK bersama 13 orang lainnya dalam operasi senyap di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Rustian diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Lembaga antirasuah sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut.

"Telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa

ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang," kata Budi Prasetyo di sela-sela Jelajah Media 2026 di Jogjakarta, Selasa (13/10) malam.

KPK belum mengungkap secara rinci dugaan keterlibatan Rustian dalam operasi senyap yang mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 1,4 miliar hingga logam mulia tersebut.

Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam sesuai KUHP untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.

Harta Kekayaan Rustian Senilai Rp 3,5 Miliar

Rustian memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 3.555.584.422. Hal itu sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) pada 20 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Harta Rustian didominasi atas tanah dan bangunan sebanyak lima bidang yang tersebar di wilayah Bogor dan Pekanbaru. Total aset berupa properti milik Rustian senilai Rp 1.729.712.000.

Selain itu, Rustian mengklaim memiliki alat transportasi sebanyak tiga unit kendaraan, di antaranya berupa Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016, Toyota Rush tahun 2018, dan Toyota Raize tahun 2023. Aset kendaraan milik Rustian dilaporkan senilai Rp 705.000.000.

Ia juga mengaku memiliki harta bergerak lainnya Rp 493.000.000, serta kas dan setara kas 627.872.422. Jika ditotalkan, harta kekayaan seluruhnya mencapai Rp 3.555.584.422

NASIONAL

Pemakzulan Gibran Bisa Diproses Asal Prabowo Mau

Oleh Redaksi · 14 Okt, 08.47 WIB



BANDA ACEH -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa saja diproses. Namun, langkah tersebut membutuhkan dukungan Politik yang kuat dari DPR serta sikap Presiden Prabowo Subianto.

Jimly menyebut dua hal yang menurutnya dapat menjadi dasar untuk menguji dugaan pelanggaran Gibran di MK. Pertama, dugaan perbuatan tercela terkait akun media sosial Fufufafa yang tidak diakui sebagai miliknya. Kedua, adanya bukti baru mengenai pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan dalam Pilpres 2024.

"Kalo mau, pemakzulan Gibran bisa diproses. Alasan bisa dibukti-

kan di MK: 1) Perbuatan tercela akun fufufafa tidak akui sebagai miliknya. 2) Ada bukti baru tentang pemenuhan syarat administrasi pilpres," tulis Jimly melalui akun X miliknya, dikutip Rabu, 14 Oktober 2026.

Meski demikian, Jimly menegaskan proses pemakzulan atau impeachment tidak bisa berjalan tanpa memenuhi persyaratan konstitusional dan dukungan politik di parlemen.

Menurutnya, inisiatif pemakzulan harus mendapatkan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kuorum kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

"Impeachment bisa diproses tapi syaratnya inisiatif 2/3x2/3 DPR

harus setuju. Prabowo mau tidak?" ujarnya.

Pernyataan Jimly muncul di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

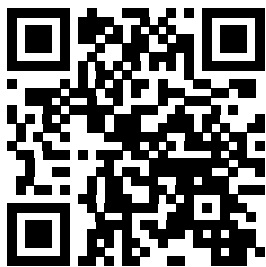
MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.

Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Sehingga Gibran tidak didiskualifikasi.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

3 BERITA

ACEH

Illiza Paparkan 58 Aplikasi Layanan, Banda Aceh Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Oleh Redaksi · 14 Okt, 23.38 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal, memaparkan berbagai inovasi dan strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada kegiatan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Aceh di Kantor Komisi Informasi Aceh, Geuceu Komplek, Rabu, 14 Oktober 2026.

Dalam paparannya, Illiza menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi publik secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan layanan digital, penguatan sistem pengaduan masyarakat, serta inovasi pelayanan yang menjangkau berbagai kebutuhan warga.

"Harapan kita ke depan, peningkatan ini semakin terintegrasi. Tidak hanya laporan masyarakat ke pemerintah kota, tetapi juga antara gampong, kecamatan, dan pemerintah kota, sehingga pelayanan bisa berjalan lebih baik," ujar

Illiza dalam wawancara sesuai kegiatan.

Ia menjelaskan, keterbukaan informasi di Banda Aceh terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut terlihat dari pengembangan Command Center yang mengintegrasikan data dari berbagai perangkat dan aplikasi untuk membantu pemantauan kondisi kota, merespons kejadian, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Pemko Banda Aceh saat ini mengelola 58 aplikasi, yang terdiri atas 26 aplikasi informasi publik dan 32 aplikasi administrasi pemerintahan. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan ialah aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) versi 2.0, dengan tampilan yang lebih ramah pengguna, proses permohonan yang ringkas, serta fitur pelacakan permohonan secara real-time.

Di bidang pengaduan masyarakat, Pemko Banda Aceh juga mengembangkan SALEUM

(Sarana Aduan Layanan Elektronik Untuk Masyarakat). Layanan ini dikembangkan setelah Pemko berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui replikasi aplikasi JAKI pada 2025, sebelum kemudian dikembangkan secara mandiri sesuai kebutuhan pelayanan di Banda Aceh.

Selain melalui platform digital, keterbukaan informasi diwujudkan lewat berbagai program yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya Forum Suara Warga sebagai ruang penyampaian aspirasi secara langsung, Ambulans Puskesmas Keliling, program Dokter Saweu Sikula, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, serta penyediaan fasilitas Wi-Fi gratis di sejumlah ruang publik dan masjid.

Menurut Illiza, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data dan dokumen pemerintahan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, dan memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam mendukung hal tersebut, Pemko Banda Aceh turut memanfaatkan CCTV dan voice announcer di sejumlah titik untuk membantu pemantauan lalu lintas, ketertiban, dan keamanan ruang publik, termasuk kawasan wisata Ulee Lheue. Pemerintah kota juga merencanakan penambahan CCTV di kawasan Kampung Jawa serta pengembangan pengawasan di titik-titik rawan lainnya.

Penguatan keterbukaan informasi juga diarahkan hingga tingkat gampong melalui pembentukan dan pendampingan PPID gampong di sembilan kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus memperkuat koordinasi pelayanan dari tingkat gampong hingga pemerintah kota.

Komitmen tersebut sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai Kota Kolaborasi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, responsif, transparan, dan akuntabel.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

Satpol PP-WH Aceh Besar Bongkar Bangunan Liar di Blang Bintang

Oleh Redaksi · 14 Okt, 18.44 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Besar menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan liar di jalan lintas Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Rabu (14/10/2026).

Penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum serta menata kawasan akses keluar-masuk bandara. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengimbau pemilik bangunan agar mengosongkan dan membongkar sendiri bangunannya. Petugas juga membantu mengangkut barang-barang milik pedagang dan mengantarkannya ke rumah masing-masing.

Kasatpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir SSTP MPA, melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Suhaimi SP mengatakan, penertiban dilakukan setelah pihaknya dua kali menyampaikan surat pemberitahuan kepada para pemilik bangunan.

"Surat pemberitahuan sudah kami sampaikan sebanyak dua kali. Masing-masing surat memberikan tenggat waktu 14 hari kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya," kata Suhaimi.

Ia menjelaskan, penertiban tersebut mengacu pada sejumlah

regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan.

Menurut Suhaimi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar berkomitmen menertibkan bangunan liar guna menjaga ketertiban dan memastikan fasilitas umum di kawasan jalan lintas Bandara SIM dapat digunakan sesuai peruntukannya.

"Penertiban ini akan terus kami lakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai hingga akhir Oktober 2026," ujarnya.

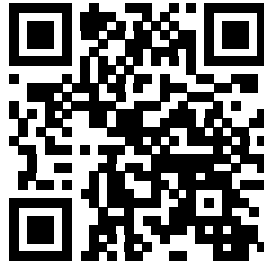
Suhaimi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan fasilitas umum untuk mendirikan bangunan maupun menjalankan aktivitas perdagangan yang mengganggu kepentingan publik.

"Kami meminta masyarakat tidak lagi mendirikan bangunan atau berjualan di fasilitas umum. Jika ingin berdagang atau menjalankan usaha, silakan menggunakan lokasi yang legal dan tidak mengganggu kepentingan umum," tegasnya.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

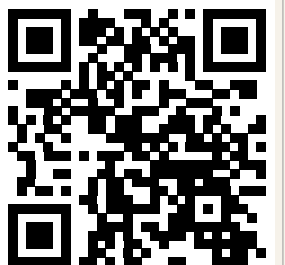
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Satgas TMMD Kodim 0108/Agara Kebut Penimbunan Jalan Penghubung Antardesa

Oleh Redaksi · 14 Okt, 08.06 WIB



BANDA ACEH, KUTACANE – Personel Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 Kodim 0108/Agara terus mempercepat pengerjaan penimbunan badan jalan yang menghubungkan Desa Lawe Kulok dengan Desa Kandang Belang, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa (13/10/2026).

Di tengah cuaca panas yang menyelimuti lokasi sasaran fisik, personel Satgas TMMD tetap bekerja maksimal. Sejumlah alat berat dan dump truck dikerahkan untuk mengangkut serta melangsir material tanah dan kerikil guna mendukung proses penimbunan badan jalan sepanjang 2.000 meter yang sebelumnya telah selesai dibuka.

Ketua Tim Lapangan yang juga menjabat sebagai Danposramil

Lawe Bulan, Peltu Alot Pranoto, menjelaskan bahwa faktor cuaca sangat memengaruhi kelancaran pekerjaan penimbunan jalan. Kondisi cuaca cerah menjadi kesempatan bagi personel Satgas untuk memaksimalkan pengerjaan di lapangan.

“Pekerjaan penimbunan badan jalan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jika hujan turun, proses pengangkutan material akan terkendala karena badan jalan menjadi becek dan licin. Apabila tetap dilalui truk pengangkut material, kondisi jalan justru berpotensi semakin rusak. Karena itu, cuaca cerah seperti sekarang harus kita manfaatkan sebaik mungkin agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target,” ujar Peltu Alot Pranoto.

Ia menambahkan, meskipun personel harus bekerja di bawah

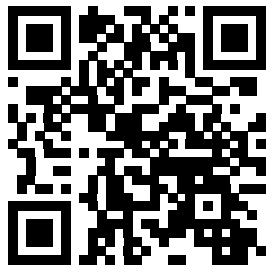
terik matahari dan menguras tenaga, semangat serta kerja sama di lapangan tetap terjaga demi mempercepat penyelesaian sasaran fisik TMMD.

Dalam pelaksanaan program TMMD ke-130 TA 2026, Kodim 0108/Agara melaksanakan pembukaan badan jalan yang dilanjutkan dengan pekerjaan penimbunan dan pengerasan menggunakan material sirtu (pasir dan batu) sepanjang 2.000 meter.

Penimbunan badan jalan menggunakan material tanah dan kerikil merupakan bagian dari tahapan pekerjaan untuk mempersiapkan badan jalan sebelum dilakukan pengerasan menggunakan sirtu. Tahapan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kondisi jalan agar lebih layak digunakan oleh masyarakat.

Melalui kegiatan TMMD ini, Satgas Kodim 0108/Agara terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Pembangunan jalan penghubung Desa Lawe Kulok dan Desa Kandang Belang diharapkan dapat memperlancar akses transportasi serta mendukung mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

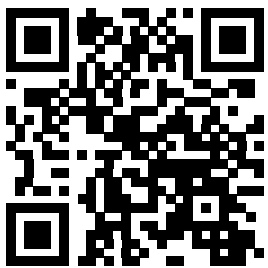
Dengan semangat gotong royong dan kerja keras seluruh personel di lapangan, Satgas TMMD ke-130 Kodim 0108/Agara berkomitmen melaksanakan setiap tahapan pekerjaan secara optimal agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.[]



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru

INTERNASIONAL

3 BERITA

INTERNASIONAL

Detik-detik Pembalasan Houthi Meledakan Kilang Aramco di Arab Saudi

Oleh Redaksi · 14 Okt, 18.53 WIB



BANDA ACEH -Terekam detik-detik pembalasan Houthi Yaman usai serangan Arab Saudi ke wilayah Sanaa Yaman.

Usai diserang habis-habisan oleh Arab Saudi dalam serangan balasan, Kelompok Houthi telah menargetkan sebuah gedung administrasi milik Aramco Arab Saudi di Kota Dhahran.

Informasi serangan Houthi itu dibenarkan oleh seorang pejabat di Kementerian Energi kepada kantor berita Saudi SPA.

Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan Houthi ke Aramco Arab Saudi yang dilakukan Selasa (13/10/2026).

Namun demikian, dari video yang viral terlihat ledakan besar di fasilitas kilang minyak terbesar di Arab Saudi.

“Pihak berwenang menanggapi kebakaran yang disebabkan oleh serangan pada hari Selasa, tidak

ada laporan cedera atau korban jiwa,” kata pihak berwenang Saudi seperti dimuat Al Jazeera.

Sebelum melakukan serangan, Houthi Yaman telah memperingatkan semua karyawan dan warga sipil di dekat fasilitas minyak Arab Saudi untuk mengungsi.

Menurut Houthi lokasi tersebut sebagai target yang sah.

Juru Bicara Houthi Yahya Saree memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Sanaa akan menghadapi pembalasan yang "keras dan menyakitkan" di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Serangan Houthi yang masif membuat empat orang terluka dan 15 rumah rusak akibat pecahan rudal yang berhasil dicegat Arab Saudi.

Diketahui Arab Saudi dan Houthi Yaman kembali memanas. Houthi terus menggempur Riyadh, Arab Saudi dan menarget-

kan bandara-bandara di Ibu Kota Arab Saudi itu.

Akibatnya belaan orang tewas dalam serangan Houthi ke Bandara Internasional King Khalid.

Dimuat AFP pihak Arab Saudi menyebutkan bahwa korban tewas merupakan empat warga negara Saudi serta dua warga negara Bangladesh, seorang warga Palestina, seorang warga negara AS, seorang warga negara Mesir, seorang warga negara Yordania, seorang warga negara Suriah, dan seorang warga negara Sudan.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa korban luka sedang dirawat di beberapa rumah sakit.

Rekaman yang diunggah di media sosial setelah serangan itu dan dianalisis oleh Associated Press menunjukkan kendaraan darurat di luar bandara.

Selain menewaskan belasan orang, lebih dari 300 orang terluka

dalam serangan yang dilakukan oleh Houthi Yaman di bandara internasional King Khalid dekat ibukotanya, Riyadh.

Serangan ini hanya berlangsung dua hari setelah serangan pertama Kamis lalu yang menewaskan tiga orang.

Otoritas Penerbangan Sipil Umum Saudi (GACA) mengatakan serangan pada hari Sabtu menewaskan sedikitnya empat warga Saudi dan dua warga Bangladesh.

Akibat serangan operasi di bandara dihentikan sementara, dengan GACA mengatakan bahwa para pejabat sedang menilai kerusakan.

Pihak Saudi seperti dimuat Al Jazeera mengutuk keras serangan Houthi.

INTERNASIONAL

Keras! Arab Saudi Peringatkan Houthi Tak Serang Makkah, Madinah dan Bandara

Oleh Redaksi · 14 Okt, 08.23 WIB



BANDA ACEH -Arab Saudi memberi peringatan keras terhadap Houthi untuk tidak menyerang Kota Makkah dan Madinah, bandara-bandara, serta fasilitas sipil lagi. Jika serangan masih berlanjut, militer Saudi akan membalas dengan serangan yang sangat keras.

Ancaman itu disampaikan Kabinet Arab Saudi, Selasa (13/10/2026), seraya menegaskan tidak akan membiarkan ancaman terhadap keamanan maupun kebebasan navigasi maritim di Laut Merah dan Selat Bab Al Mandab.

"(Houthi) Akan menanggung akibat dari kejahatan dan serangan keji yang dilakukannya secara berulang," bunyi pernyataan, sebagaimana dilaporkan kantor berita milik pemerintah SPA.

Lebih lanjut Kabinet memberikan apresiasi kepada negara-

negara dan organisasi internasional yang mengecam serangan kelompok yang didukung Iran tersebut.

Kabinet juga memuji operasi militer yang dilakukan koalisi pendukung pemerintahan Yaman yang sah, seraya menegaskan operasi tersebut bertujuan untuk menetralkan ancaman milisi Houthi terhadap rakyat Yaman, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi perdagangan global dan rantai pasok internasional.

Kabinet turut menyambut baik pemulihan aliran minyak melalui pipa Timur-Barat. Pemulihan yang cepat tersebut mencerminkan ketangguhan sistem energi Arab Saudi serta kemampuannya dalam merespons kondisi darurat guna menjamin keberlanjutan pasokan energi ke pasar internasional

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

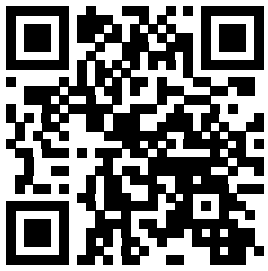
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

Koalisi Saudi Gempur Depot Bahan Bakar Houthi di Tiga Wilayah Yaman

Oleh Redaksi · 14 Okt, 13.42 WIB



BANDA ACEH -Pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah sah Yaman melancarkan operasi militer dengan menasar sejumlah fasilitas bahan bakar yang digunakan kelompok Houthi di Sanaa, Hodeidah, dan Dhamar.

Operasi tersebut bertujuan melumpuhkan kemampuan Houthi dalam melancarkan serangan terhadap Arab Saudi serta mengamankan jalur pelayaran internasional.

Juru bicara koalisi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengatakan komando gabungan pasukan koalisi telah mengidentifikasi sejumlah objek sipil dan fasilitas vital yang diduga dimanfaatkan Houthi untuk mendukung operasi militernya.

Sasaran serangan meliputi Stasiun Bahan Bakar Al-Sabaha di Sanaa, tangki penyimpanan bahan bakar bawah tanah, depot cadangan bahan bakar, serta fasilitas pengangkutan dan pembongkaran

bahan bakar di tiga wilayah tersebut.

Al-Maliki menyebut operasi itu sebagai operasi khusus yang menargetkan titik-titik tertentu untuk menetralkan kemampuan Houthi yang dinilai mengancam Arab Saudi, Yaman, wilayah selatan Laut Merah, dan jalur perairan internasional.

"Operasi ini berfokus pada menetralkan kemampuan yang digunakan milisi Houthi untuk mengancam kerajaan, Yaman, Laut Merah bagian selatan, dan koridor maritim," ungkapnya, dikutip Rabu, 14 Oktober 2026.

Menurut Al-Maliki, fasilitas tersebut digunakan Houthi untuk menopang operasi militer sekaligus memperkuat persenjataan rudal dan drone.

Dia menuding kelompok itu mengalihkan sumber daya yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Yaman demi mendukung aktivitas militernya.

Dikatakan bahwa pemanfaatan fasilitas tersebut berkontribusi terhadap serangan terhadap warga sipil dan objek sipil, serta digunakan untuk merencanakan serangan yang dinilai segera terjadi terhadap sasaran sipil di Arab Saudi dan kapal-kapal komersial di perairan internasional.

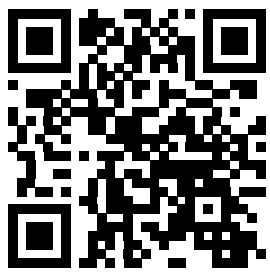
Di sisi lain, Al-Maliki menegaskan koalisi tetap berkomitmen mematuhi hukum humaniter internasional. Seluruh tindakan pencegahan yang memungkinkan telah dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi guna menghindari jatuhnya korban sipil maupun kerusakan tambahan.

Koalisi mendesak Houthi segera menghentikan seluruh operasi teroris yang menargetkan warga sipil dan objek sipil, termasuk bandara, pelabuhan, fasilitas minyak, serta infrastruktur lainnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

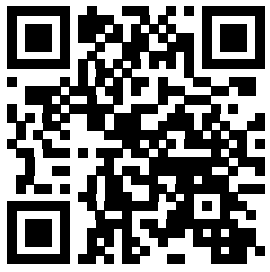
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



EKONOMI

3 BERITA

EKONOMI

Kelangkaan BBM di Jembrana Makin Parah, 8 Ton Pertalite Ludes dalam Hitungan Jam

Oleh Redaksi · 14 Okt, 16.53 WIB



BANDA ACEH – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Jembrana, Bali, semakin parah. Antrean panjang kendaraan mengular hampir di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang memiliki pasokan BBM jenis Pertalite, Rabu (14/10/2026).

Fenomena antrean kendaraan tersebut sejatinya sudah terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Warga bahkan rela mengantre dan menunggu lebih dari 3 jam di SPBU sebelum armada pengangkut BBM Pertamina tiba di lokasi.

Akibat lonjakan antrean yang begitu masif, stok BBM jenis Pertalite pasokan dari Pertamina lang-

sung ludes hanya dalam hitungan jam. Kondisi ini seperti yang terjadi di SPBU Ngurah Rai, Kecamatan Jembrana, dan SPBU Kaliakah, Kecamatan Negara.

Pengawas SPBU Kaliakah, Andika Mahayuda, membeberkan bahwa pihaknya telah menerima pasokan BBM sebanyak 8 ton pada Rabu dini hari. Namun, tingginya permintaan warga membuat pasokan tersebut tidak bertahan lama.

"Kelangkaan BBM di Kabupaten Jembrana terjadi mulai Senin. Hingga saat ini pasokan BBM masih sangat langka dan terbatas, hanya BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Sedangkan jenis Pertamina sudah dua hari menga-

lami kekosongan," ujar Andika Mahayuda, Rabu (14/10/2026).

Krisis BBM di Jembrana kian diperparah dengan tidak tersedianya pasokan BBM non-subsidi jenis Pertamina maupun Pertamina Turbo di sejumlah SPBU.

Habisnya seluruh varian BBM membuat warga terpaksa memutar balik kendaraan mereka untuk mencari SPBU lain yang masih memiliki sisa stok.

Warga Kabupaten Jembrana sangat berharap pihak Pertamina dan pemerintah daerah segera menormalkan pasokan serta distribusi BBM agar mobilitas dan aktivitas perekonomian harian masyarakat tidak terganggu

EKONOMI

Krisis BBM Lumpuhkan Bali: Antrean Mengular di SPBU Capai 3 Kilometer

Oleh Redaksi · 14 Okt, 13.47 WIB



BANDA ACEH — Antrean panjang kendaraan mengular hingga mencapai 3 kilometer terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Bali. Lonjakan antrean memicu kelangkaan pasokan BBM tersebut memicu kepanikan warga hingga memicu insiden seorang pengantri pingsan di lokasi akibat terlalu lama mengantre di tengah cuaca panas.

Aparat kepolisian dari polda setempat dan jajaran polsek diturunkan ke lokasi untuk mengamankan situasi, mengurai kemacetan lalu lintas, serta langsung mengevakuasi warga yang pingsan untuk mendapatkan pertolongan medis.

Di beberapa titik, seperti di SPBU Darmasaba, pasokan bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamina dilaporkan telah habis total sejak pagi hari. Warga yang mengantre sejak subuh terpaksa gigit jari dan diarahkan petugas ke lokasi SPBU alternatif yang masih memiliki stok sisa.

Petugas kepolisian mengimbau warga untuk tetap tertib dan tidak memaksakan diri mengantre jika kondisi fisik tidak memungkinkan.

Pihak Pertamina mengonfirmasi adanya keterlambatan distribusi yang memicu kelangkaan sementara di sejumlah SPBU kawasan Denpasar dan Badung. Gangguan distribusi disebabkan oleh masalah teknis pada jangkar kapal tanker

yang mengangkut kargo BBM saat hendak berlabuh di Depo Manggis. Kendala tersebut menggeser jadwal pembongkaran BBM yang semula direncanakan pagi hari menjadi malam hari.

Pihak terkait memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan memastikan ketersediaan stok BBM jenis Pertalite maupun Pertamina di wilayah Bali sebenarnya dalam kondisi aman hingga dua minggu ke depan.

Untuk mempercepat pemulihan pasokan, Depo Manggis serta SPBU di wilayah terdampak dioperasikan selama 24 jam penuh. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan panic buying dan membeli BBM sesuai kebutuhan

EKONOMI

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Diganti Suroso

Oleh Redaksi · 14 Okt, 20.07 WIB



BANDA ACEH -PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengganti Direktur Utama Darmawan Prasodjo dari jabatannya.

Posisi tersebut selanjutnya diisi Suroso Isnandar yang sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.

Pergantian pucuk pimpinan PLN tersebut dikonfirmasi Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, Rabu, 14 Oktober 2026.

"Betul," kata Dony kepada RMOL saat dikonfirmasi melalui pesan singkat

BACA LEBIH LENGKAP

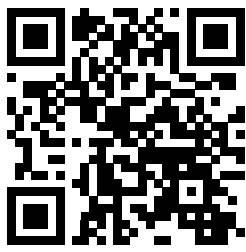
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id



Pindai untuk berita terbaru

ANEKA BERITA

7 BERITA

LINGKUNGAN

Tujuh Panglima Laot Simeulue Perkuat Kemitraan dengan DKP Aceh Jaga Kawasan Konservasi PISISI

Oleh Hamdani · 14 Okt, 19.45 WIB



Kepala UPTD PKKPD DKP Aceh, Erwandi, S.Pi., menerima kunjungan tujuh Panglima Laot Lhok yang berada di Kawasan Konservasi Perairan PISISI, Kabupaten Simeulue, dalam rangka memperkuat koordinasi dan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi, di Banda Aceh

BANDA ACEH — Tujuh Panglima Laot Lhok yang berada di Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, dan Pulau Simanaha (PISISI), Kabupaten Simeulue, memperkuat koordinasi dan kemitraan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh untuk menjaga kelestarian ekosistem laut serta keberlanjutan sumber daya perikanan.

Penguatan kemitraan tersebut dibahas dalam pertemuan tujuh Panglima Laot dengan Kepala UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (PKKPD) DKP Aceh, Erwandi, S.Pi., di Kantor UPTD PKKPD DKP Aceh, Banda Aceh, Kamis 24/9/2026.

Ketujuh Panglima Laot tersebut masing-masing berasal dari Lhok Ujung Tinggi, Lhok Pulau Siumat, Lhok Pulau Bengkalak, Lhok Kuala Makmur, Lhok Kuala Baru, Lhok Sambay, dan Lhok Air Pinang.

Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus memba-

ngun sinergi antara pengelolaan kawasan konservasi oleh pemerintah dan kewenangan adat Panglima Laot dalam menjaga wilayah perairan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berbagi pengalaman dan pembelajaran mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan berbasis kearifan lokal. Para Panglima Laot juga menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas nelayan di dalam kawasan konservasi, serta mendiskusikan peluang kerja sama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan PISISI.

Kepala UPTD PKKPD DKP Aceh, Erwandi, S.Pi., menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan perlu berpedoman pada tiga aspek utama, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Menurutnya, kawasan konservasi harus terlindungi dari berbagai aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem dan meng-

ganggu keseimbangan lingkungan perairan. Upaya perlindungan tersebut perlu berjalan beriringan dengan pelestarian keanekaragaman hayati serta pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, kawasan konservasi tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitarnya. Karena itu, pemanfaatan sumber daya perikanan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kearifan lokal, norma adat, dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Keberadaan Panglima Laot dengan kewenangan wilayah adatnya dinilai menjadi unsur penting dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Pengetahuan lokal dan keterlibatan langsung lembaga adat dalam kehidupan masyarakat nelayan dapat memperkuat pemantauan aktivitas perikanan, mendorong kepatuhan terhadap aturan, serta meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut.

Koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan personal dan kelembagaan, menyamakan pemahaman mengenai tugas dan fungsi masing-masing pihak, serta memperkuat konsolidasi dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan tanggung jawab bersama melalui sinergi antara kebijakan pemerintah, ketentuan hukum yang berlaku, dan norma adat yang hidup di tengah masyarakat pesisir.

Melalui kemitraan yang semakin kuat, DKP Aceh bersama tujuh Panglima Laot di kawasan PISISI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengawasan kawasan, menjaga kelestarian ekosistem laut, serta memastikan sumber daya perikanan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan hingga generasi mendatang.[]

TOKOH

Martha Tilaar Meninggal Dunia Hari Ini

Oleh Redaksi · 14 Okt, 10.39 WIB



Pendiri merek kosmetik Martha Tilaar, Dr. (H.C.) Martha Tilaar, meninggal dunia pada Rabu (14/10/2026) pagi. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kabar duka datang dari dunia kecantikan Indonesia. Pendiri merek kosmetik Martha Tilaar, Dr. (H.C.) Martha Tilaar, meninggal dunia pada Rabu (14/10/2026) pagi dalam usia 89 tahun.

Informasi meninggalnya Martha Tilaar disampaikan keluarga besar Tiara Kusuma, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia.

Dalam pernyataan dukanya, Martha disebut merupakan Dewan Kehormatan Tiara Kusuma.

Jenazah Martha Tilaar saat ini disemayamkan di Rumah Duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan informasi pada pengumuman duka, Martha lahir pada 4 September 1937 dan meninggal dunia pada 14 Oktober 2026.

Keluarga besar Tiara Kusuma menyampaikan penghormatan atas inspirasi, dedikasi, dan kontribusi

Martha Tilaar bagi perkembangan dunia kecantikan di Indonesia.

"Terima kasih atas segala inspirasi, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan bagi dunia kecantikan Indonesia," demikian pernyataan Tiara Kusuma.

Kepergian Martha Tilaar menjadi kabar duka bagi dunia kecantikan Tanah Air.

Dedikasi dan kiprahnya selama puluhan tahun telah menjadikannya salah satu tokoh yang dikenal dalam perkembangan industri kecantikan Indonesia.

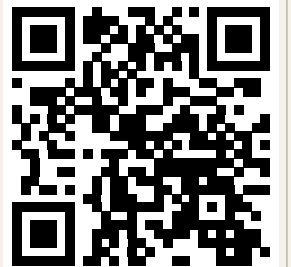
Tiara Kusuma turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan serta mendoakan agar almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Keluarga yang ditinggalkan juga diharapkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kehilangan tersebut.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

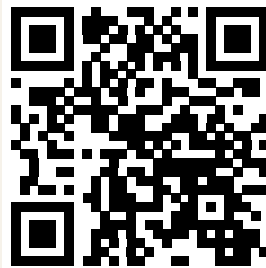
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ISLAM

Bullying Terus Berulang, Tak Cukup Hanya Dengan Pegawasan

Oleh Ria Nurvika · 14 Okt, 14.56 WIB



Ilustrasi kontras perundungan di sekolah dan pentingnya pendidikan karakter berbasis akhlak serta keadilan syariat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi anak. FOTO/AI for HAI.

Oleh: Ria Nurvika Ginting, S.H.,M.H

ASUS perundungan yang mengakibatkan korban sampai kehilangan nyawa kembali terjadi di lingkungan sekolah. Seorang siswa kelas 2 SD di Pemalang meninggal dunia akibat perundungan yang dilakukan oleh senior-nya.

Penanganan hukum terhadap pelaku dilakukan secara khusus mengingat usia mereka masih di bawah 12 tahun. Keduanya ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan telah dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Keputusan itu berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pemalang atas hasil pengambilan keputusan bersama penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional terhadap dua ABH tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menangani kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah, termasuk

kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang belum lama ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian koordinasi untuk memantau perkembangan kasus perundungan yang ada di Kabupaten Pemalang, termasuk memastikan dukungan bagi keluarga korban karena penanganan perundungan tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian kasus.

Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Jateng juga mendorong penguatan sistem keamanan di sekolah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan kamera pengawas atau CCTV, terutama di titik-titik yang belum terpantau secara optimal.

Pemprov Jateng berharap penguatan koordinasi, pendampingan korban, peningkatan pengawasan, dan edukasi berkelanjutan dapat menekan kasus perundungan di lingkungan pendidikan sekali-

gus menciptakan ruang belajar yang aman bagi anak-anak.

Namun, jika diperhatikan ternyata langkah-langkah ini tidak menyentuh akar persoalan bullying yang sudah berulang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Butuh solusi tuntas yang menyentuh akar persoalan, mengapa perundungan (bullying) semakin marak di dunia pendidikan.

UU Perlindungan Anak

Perlindungan Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Terkait dengan bullying diatur dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terha-

dap anak." Ancaman hukuman bagi yang melanggar pasal ini adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

Namun pelaku bullying juga merupakan teman sebaya korban yang juga merupakan anak dibawah umur sehingga tidak dapat diadili sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Para pelaku dibawah umur diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Nah, dalam Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 ini maka hukuman tindak pidana yang dilakukan anak dikurangi setengah dari ancaman hukuman yang berlaku pada orang dewasa sehingga hukuman maksimal yang dapat diberikan pada pelaku bullying ini adalah 2 (dua) ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

LINGKUNGAN

Menyegel Konsesi, Menguji Nyali Hukum Lingkungan Kita

Oleh Explore Vipho GRAS · 14 Okt, 13.50 WIB



Ilustrasi: Trisna Dasa Wardana – Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang, gambar dibuat dengan bantuan AI (Claude, Anthropic).

MEDAN - Puncak kemarau panjang kembali menyuguhkan pemandangan yang memilukan di langit Indonesia. Di tengah kepungan kabut asap yang mencekik ruang hidup, publik menyaksikan satu langkah progresif dari meja hijau birokrasi. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara masif mengambil tindakan tegas dengan menyegel puluhan entitas perusahaan yang wilayah konsesinya terbukti membara. Berdasarkan data penegakan hukum terbaru, puluhan area konsesi korporasi nakal termasuk belasan izin konsesi di Sumatera Selatan dan wilayah Kalimantan telah dipasangi garis segel penegak hukum untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.

Langkah agresif ini merupakan manifestasi langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla. Mandat dari kepala negara kali ini sangat eksplisit: zero tolerance. Tidak ada ruang negosiasi atau kompromi bagi siapa pun yang sengaja atau lalai membiarkan lahannya terbakar demi memangkas biaya operasional. Bagi masyarakat awam, riuh rendah penyege- lan ini mungkin sekadar terlihat seperti upacara seremonial biasa. Namun, di balik pemasangan plang kuning dan garis pembatas penegak hukum tersebut, ada sebuah pertarungan besar sedang diuji: ketegasan taji hukum lingkungan kita.

Tanggung Jawab Mutlak Korporasi

Untuk memahami mengapa korporasi harus bertanggung jawab mutlak atas kebakaran di lahannya, kita bisa menggunakan analogi sederhana tentang juragan angkutan umum. Bayangkan sebuah perusahaan transportasi yang memiliki ratusan armada bus raksasa. Suatu hari, salah satu bus

tersebut mengalami rem blong di jalan raya dan menabrak fasilitas publik hingga menimbulkan korban jiwa. Apakah pemilik perusahaan bisa berkelit dengan mengatakan, "Itu bukan salah saya, itu salah sopirnya yang mengantuk," atau "Remnya blong sendiri karena faktor cuaca panas"? Tenu tidak. Sebagai pemilik bisnis yang meraup keuntungan dari operasional bus tersebut, hukum membebankan tanggung jawab mutlak atas kelaikan armada dan keselamatan jalur yang mereka lalui.

Logika hukum yang sama bekerja mutlak pada kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah mengunci rapat celah berkelit bagi para pemegang izin lahan. Lewat doktrin hukum Strict Liability (tanggung jawab mutlak), korporasi tidak lagi bisa menggunakan pembelaan klise seperti "Lahan kami dibakar oleh perambah liar" atau "Suhu ekstrem memicu percikan api alami". Selama titik api (hotspot) berada di dalam koordinat konsesi perizinan yang mereka kelola dan ambil keuntungannya, mereka wajib memikul tanggung jawab hukum penuh. Hukum memandangkan perizinan berusaha bukan sekadar lembaran kertas hak eksploitasi, melainkan sebuah kontrak kewajiban mutlak untuk menjaga, mengawasi, dan memitigasi segala risiko ekologis di atas tanah tersebut.

Gambut dan Ancaman Bencana Ekologis

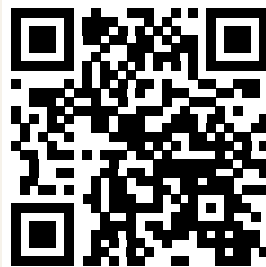
Salah satu titik krusial yang sering luput dari pemahaman publik adalah karakteristik lahan yang terbakar, terutama lahan gambut. Membakar gambut bukan seperti membakar sampah di pekarangan rumah yang bisa padam ketika disiram air.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

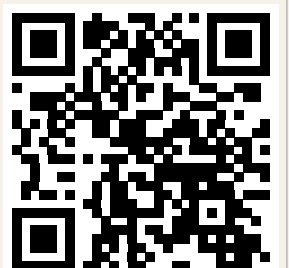
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



TEKNOLOGI

Telkomsel Bagi-bagi Hadiah Mobil dan Motor, Ini Cara Dapatkannya

Oleh Redaksi · 14 Okt, 16.17 WIB



BANDA ACEH - Telkomsel menghadirkan program Bagi-Bagi Bahagia sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan SIMPATI, Halo, dan Orbit. Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memperoleh nilai tambah dari aktivitas dan transaksi yang mereka lakukan sehari-hari bersama Telkomsel melalui mekanisme pengumpulan kupon dan pengundian berkala.

Berlangsung mulai 12 Oktober 2026 hingga 8 Februari 2027, Bagi-Bagi Bahagia menghadirkan pengalaman yang lebih bernilai bagi pelanggan. Program ini menjadi bagian dari upaya Telkomsel untuk terus menghadirkan nilai tambah sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang telah mempercayakan kebutuhan konektivitas dan layanan digitalnya kepada Telkomsel selama lebih dari 31 tahun.

Untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada pelanggan, Telkomsel akan melaku-

kukan pengundian secara rutin setiap minggu selama periode program, dengan total 17 kali pengundian. Pengundian yang dilakukan secara berkala ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelanggan untuk berpartisipasi sepanjang periode program.

Sebagai bagian dari program ini, Telkomsel menyiapkan total 151 hadiah terdiri dari 31 unit BYD M6 EV dan 120 unit Yamaha NMAX. Kehadiran hadiah ini menjadi bentuk apresiasi yang memperkuat nilai tambah yang dapat diterima pelanggan melalui partisipasi mereka dalam program.

"Pelanggan adalah bagian penting dari perjalanan Telkomsel. Karena itu, kami terus mencari cara untuk menghadirkan pengalaman yang lebih bernilai dalam setiap interaksi pelanggan dengan layanan kami. Melalui Bagi-Bagi Bahagia, kami ingin memberikan bentuk apresiasi yang sederhana namun bermakna, dengan membuka kesempatan bagi pelanggan

untuk memperoleh reward dari aktivitas yang sudah menjadi bagian dari keseharian mereka bersama Telkomsel. Semangat inilah yang menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus Melayani Sepenuh Hati," ujar Direktur Marketing Telkomsel, Lionel Chng, dalam siaran pers, Rabu (14/10/2026).

Untuk mengikuti program Bagi-Bagi Bahagia, pelanggan perlu melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi MyTelkomsel, SMS ke 777 dengan mengetik JOIN, BBB, atau YES, maupun melalui USSD *700*136#. Setelah registrasi berhasil dilakukan, transaksi yang memenuhi ketentuan akan secara otomatis menghasilkan kupon undian.

Kupon diperoleh dari transaksi yang memenuhi syarat, termasuk pembelian paket data, voice, SMS, VAS, DLS, serta pembayaran tagihan pascabayar. Setiap kelipatan Rp10.000 nilai transaksi yang

telah dibulatkan akan menghasilkan satu kupon undian. Kupon yang terkumpul akan diikutsertakan dalam pengundian mingguan selama periode program berlangsung.

Pemenang akan diumumkan melalui aplikasi MyTelkomsel paling lambat H+4 setelah setiap pengundian. Telkomsel juga menanggung pajak hadiah dan biaya distribusi hadiah kepada para pemenang. Telkomsel mengimbau pelanggan untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel.

Informasi resmi mengenai program Bagi-Bagi Bahagia, termasuk mekanisme, daftar pemenang, serta syarat dan ketentuan program, hanya dapat diakses melalui aplikasi MyTelkomsel dan kanal resmi Telkomsel di telkomsel.com.

ISLAM

Ketika Negara Mengatur Kain di Kepala Perempuan: Pelajaran dari Wahyu, Sunnah dan Sejarah

Oleh Darin Abu Hanifah · 14 Okt, 10.58 WIB



Momen Zahra Hasanova, seorang guru di Azerbaijan yang mengenakan hijab, diusir dari sekolahnya. Gambar ini menampilkan interaksi emosional antara Zahra dan sekelompok siswa

Negara Muslim Azerbaijan larang hijab di sekolah. Bagaimana Al-Qur'an, hadits, dan sejarah Islam menjawabnya?

Oleh: Hanny N

DA satu gambar yang menggambarkan Azerbaijan akhir-akhir ini lebih jelas daripada ribuan kata pernyataan pemerintah: sekelompok siswa menangis di depan gerbang sekolah, memeluk erat gurunya yang dilarang masuk mengajar. Alasannya sederhana namun menusuk - sang guru, Zahra Hasanova, mengenakan hijab.

Kebijakan yang disahkan melalui amandemen bulan lalu itu membatasi pakaian di sekolah yang dianggap bertentangan dengan "prinsip sekularisme". Pemerintah Azerbaijan, melalui kantor berita negara APA, menjelaskan bahwa aturan seragam itu bertujuan menciptakan standar berpakaian yang seragam di lembaga pendidikan negeri. Terdengar administratif, netral, bahkan masuk akal. Namun di balik bahasa birokrasi itu, ada wajah-wajah nyata: seorang guru yang diusir dari kelasnya bukan karena tidak kompeten, bukan karena keliru mengajar, melainkan karena kain yang melilit kepalanya dianggap melanggar standar.

Azerbaijan bukan negara kecil yang boleh diabaikan begitu saja. Negara di kaki pegunungan Kaukasus ini memiliki sekitar 96 persen penduduk Muslim. Konstitusinya menetapkan Azerbaijan sebagai negara sekuler - tetapi pada saat yang sama secara eksplisit menjamin kebebasan beragama. Dua kepastian hukum ini kini bertabrakan di depan mata dunia. Dan pertanyaannya bukan lagi soal Azerbaijan semata, melainkan soal batas akhir kuasa negara atas hati nurani warganya: sejauh mana sebuah pemerintahan boleh mengatur apa yang dikenakan di kepala seorang perempuan?

Yang Dikatakan Wahyu

Sebelum membahas politik, marilah kita kembali kepada sumber nilai yang paling otoritatif bagi umat Muslim: Al-Qur'an.

Allah berfirman:

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama." (QS. Al-Baqarah: 256)

Dan firman-Nya:

"Maka barangsiapa mau, hendaklah ia beriman, dan barangsiapa mau, hendaklah ia kafir." (QS. Al-Kahf: 29)

Perhatikan dengan seksama arah kedua ayat ini. Larangan paksaan itu justru dinyatakan dalam konteks urusan iman — sesuatu yang jauh lebih esensial, lebih mendasar, lebih menentukan nasib akhirat manusia daripada sekadar pakaian. Jika keyakinan kepada Allah saja tidak boleh dipaksa, bagaimana logika yang masuk akal bisa membenarkan negara memaksa cara berpakaian? Wahyu mengajarkan prinsip yang sederhana namun kokoh: apa yang diserahkan kepada keputusan hati manusia, tidak boleh diambil alih oleh pedang, hukuman, maupun peraturan birokrasi.

Sementara itu, tentang hijab itu sendiri, perintahnya datang dari Allah melalui ayat yang diturunkan bukan untuk kepentingan administrasi, melainkan untuk kemuliaan perempuan beriman. Allah memerintahkan perempuan beriman agar "menahan pandangannya" dan "menarik kain penutupnya (khumur) ke dadanya" (QS. An-Nur: 31). Poin pentingnya di sini: hijab adalah perintah agama yang dijalankan atas dasar takwa - bukan seragam yang disetujui dewan sekolah, bukan pula atribut yang boleh digodok dalam ruang rapat menteri.

Al-Qur'an bahkan dengan gamblang menegaskan bahwa perbedaan dan keragaman adalah sunnatullah:

"Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan umat manusia satu umat, tetapi (Allah menghendaki) untuk menguji kalian terhadap apa yang telah diberikan-Nya kepadamu." (QS. Al-Maidah: 48)

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

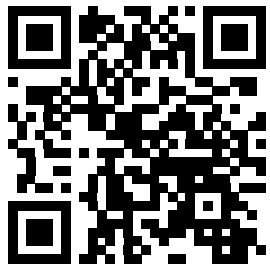
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



KOMUNITAS

Panglima Laot Krueng Raba Gandeng SBA Atasi Pendangkalan Muara, Dukung Aktivitas Nelayan

Oleh Hamdani · 14 Okt, 08.03 WIB



Penyerahan bantuan sarana pembersihan alur pelayaran kepada Panglima Laot Lhok Krueng Raba melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026 PT Solusi Bangun Andalas (SBA), di Balai Nelayan TPI Lhok Krueng Raba, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Kamis (8/10/2026). Bantuan ini diharapkan memperlancar aktivitas nelayan sekaligus mendukung

ACEH BESAR — Panglima Laot Lhok Krueng Raba, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, menjalin kemitraan dengan PT Solusi Bangun Andalas (SBA) melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026 untuk mendukung penanganan pendangkalan muara yang selama ini mengganggu aktivitas keluar-masuk perahu nelayan.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan sarana pembersihan alur pelayaran yang diserahkan di Balai Nelayan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lhok Krueng Raba, Kamis (8/10/2026). Bantuan ini diharapkan dapat membantu memperlancar akses nelayan sekaligus mendukung pengelolaan kawasan perairan secara berkelanjutan.

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, Kepala UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Kepala BPRL

Padang Wilayah Kerja Aceh Kris Handoko, Camat Lhoknga, Kapolsek Lhoknga, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Lhoknga, Imuem Mukim Lhoknga, para keuchik dari Gampong Mon Ikeun, Lamkruet, dan Lampaya, serta Panglima Laot Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Dalam sambutannya, Kepala UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan perairan, terutama wilayah yang memiliki beragam kepentingan pemanfaatan.

Menurutnya, laut merupakan ruang bersama yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari penangkapan ikan oleh nelayan, wisata bahari, jalur transportasi dan pelayaran, hingga pertahanan dan keamanan. Karena itu, setiap aktivitas perlu dikelola secara terpadu dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan Panglima Laot sebagai lembaga adat memiliki peran penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Hal tersebut perlu disinergikan dengan kepentingan lainnya, termasuk operasional jalur pelayaran, pengawasan, serta keamanan kawasan perairan.

Dalam konteks itu, pemberdayaan nelayan harus menjadi perhatian bersama melalui kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Pengelolaan kawasan perairan, katanya, perlu mengedepankan prinsip konservasi yang mencakup perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.

Terkait pendangkalan muara Krueng Raba, ia menyarankan perlunya kajian lebih lanjut untuk mengetahui pola sedimentasi dengan mempertimbangkan kondisi arus, angin, dan musim, serta pengetahuan lokal masyarakat setempat. Kajian tersebut dinilai

penting agar penanganan pendangkalan dapat dilakukan secara tepat tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem perairan.

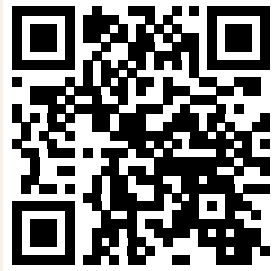
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPRL Padang Wilayah Kerja Aceh, Kris Handoko, memberikan edukasi mengenai tata cara pembersihan sedimen sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diperlukan agar kegiatan pembersihan alur pelayaran tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun mengganggu ekosistem perairan di sekitarnya.

Melalui kemitraan ini, bantuan sarana pembersihan alur pelayaran diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas nelayan di muara Krueng Raba, Lhoknga. Kolaborasi antara Panglima Laot, pemerintah, dan pihak swasta juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perairan di Aceh Besar.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

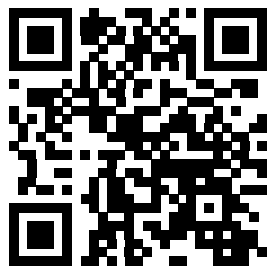
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia